RENCANA STRATEGIS

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BOVEN DIGOEL

2021-2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI.....ii

KATA PENGANTAR iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum.....2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOVEN DIGOEL.....6

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.....6

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.....21

2.2 Sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.....21

2.2.3 Keuangan.....26

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 28

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.....33

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.....36

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.....36

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....38

3.2.1 Keterkaitan Visi Mis daerah dan OPD DPPKB 39

BAB IV TUJUAN DAN SARAN 35

4.1 Tujuan 35

4.2 Saran.....36

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....39

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....39

5.2 Arah Kebijakan dan Strategi Penggarapan Program BANGGA KENCANA di Kabupaten Boven Digoel.....40

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....49

6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....49

6.1.1 Matriks Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 52

6.1.2 Tabel indikator Kinerja.....58

6.1.3 Tabel Indikator Kinerja sasaran RPJMD 62

BAB VII PENUTUP.....72

8.1 Kesimpulan.....72

8.2 Saran.....74

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel 2021-2025 ini dapat tersusun. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Boven Digoel selama jangka waktu lima tahun mendatang.

Dengan adanya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional ada kewajiban bagi satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Boven Digoel tahun 2021-2025, ini mengacu pada rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Boven Digoel dan Restra Perwakilan BKKBN Provinsi Papua

Kepada seluruh staf, Kepala Bidang dan Seksi-seksi dijajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah bekerja keras dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2025 disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasinya sehingga Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Boven Digoel melalui Renstra DPPKB yang tercinta ini dapat tercapai.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih banyak kekurangan sehingga diharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Rencana Strategis ini dapat lebih sempurna.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kab. Boven Digoel

dr. Viviana Maharani Pradotokoesoemo, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640917199503200

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA) di masyarakat Kabupaten Boven Digoel merupakan investasi dalam peningkatan sumber daya manusia. Masyarakat yang sehat akan menciptakan manusia yang dapat hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Untuk mewujudkan tujuan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembanguan Keluarga tersebut diperlukan pembangunan kesehatan yang utuh, berkualitas dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mempercepat pembangunan Keluarga Berencana dan Kependudukan diperlukan kebijakan pembangunan kesehatan yang dinamis dan proaktif dengan melibatkan sektor terkait. Rencana Strategis Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga merupakan suatu konsep yang disusun dengan sistematis sebagai suatu panduan dalam menjalankan pembangunan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Kabupaten Boven Digoel adalah kabupaten yang masih sangat baru sehingga terdapat berbagai persoalan yang harus diselesaikan. Secara struktur bidang kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga termasuk dalam program yang juga diperhitungkan dalam pembangunan Kabupaten Boven Digoel. Akses pelayanan Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga dimasyarakat mengalami banyak kendala. Jarak tempuh ke fasilitas kesehatan khususnya Balai Penyuluh KB masih jauh, termasuk jumlah tenaga PLKB dan dana operasional PLKB yang terbatas serta infrastruktur yang belum mendukung. Permasalahan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terlihat dengan jelas , masih banyaknya masyarakat Boven Digoel yang belum menjadi akseptor KB. Disamping itu permasalahan Remaja pun banyak dijumpai dimasyarakat diantaranya, Kehamilan usia dini, perdarahan, kehamilan yang tidak di inginkan juga masih banyak di jumpai di Kabupaten Boven Digoel dan lain sebagainya .Melihat permasalahan yang ada, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) selaku ujung tombak pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Boven Digoel, telah merancang suatu konsep rencana Strategis pembangunan BANGGA KENCANA untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Dokumen Renstra perangkat daerah bersifat partisipatif yang penyusunannya melibatkan stakeholders : Wakil Rakyat, masyarakat, pemerintah kota, pengusaha, LSM, dll. Metode partisipatif dinilai efektif dalam menjamin komitmen pemerintah daerah terhadap kesepakatan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Partisipasi stakeholders dalam penyusunan dokumen renstra perangkat daerah dilakukan hingga saat penjabarannya kedalam RPMJD dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan yang termasuk di dalam renstra lima tahunan.

Dokumen renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara Strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karna mampu memberikan program-program Strategis sesuai dengan kebutuhan masing- masing bidang dalam lingkup perangkat daerah.

Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan Strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam renstra yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja kepala daerah sesuai dengan PP No. 108 Tahun 2000, dengan memperhatikan indikator evaluasi kinerja yang disosialisasikan secara nasional melalui modul pelatihan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

LAKIP merupakan penjelasan dari INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang LAKIP. Dalam mendukung usaha ini, indikator pengukuran kinerja akan digunakan oleh DPRD untuk mengukur kinerja tahunan Bupati di akhir masa jabatannya. Pola berpikir dan penyusunan Rencana Strategis pembangunan BANGGA KENCANA untuk lima tahun adalah berpedoman pada prioritas masalah kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang terdapat pada masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) tentang hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta hak mendapatkan pelayanan kesehatan.
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
8. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
9. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Kepmenkes No. 574/Menkes/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2017;
15. Kepmenkes No. 004/Menkes/VIII/2003 tentang Indonesia Sehat 2017 & Pedoman Penetapan Indikator Propinsi Sehat dan Kab/Kota Sehat;
16. Kepmenkes No. 1457/Menkes/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kab/Kota;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 adalah sebagai dokumen perencanaan jangka Menengah yang memuat tujuan, sasaran,strategi dan kebijiakan oraganisasi, serta memuat rencana program dan kegiatan indikatif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.3.1 Maksud

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapakan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan, keluarga Berencana dan pembangunan keluarga (BANGGA KENCANA) dalam Kurun waktu 5 (Lima) tahun;
2. Menjamin terciptannya integrasi, sikroninasasi dan sinergi program kepundudukan dan keluarga berencana (KKB) mulai tingkat pusat sampai daerah;
3. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan antar sektor di Kabupaten Boven Digoel.

1.3.2 Tujuan

1. Tersedianya acuan resmi dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel antara tahun 2021-2025.
2. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan BANGGA KENCANA, baik antara pusat dan daerah, antar waktu dan antar fungsi.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penyelenggara, pelaksana dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan BANGGA KENCANA.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah terkait di daerah untuk memahami dalam menentukan program-program KKB, selanjutnya ditindaklanjuti dalam kegiatan-kegiatan terukur berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2025 sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur OrganisasiDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.2	Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra K/L (Kementrian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
	3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	4.2	Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	
	5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
	6.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB VII	PENUTUP	

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

2.1 Tugas, Fungsi & Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 1 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja DPPKB Kabupaten Boven Digoel, struktur DPPKB Kabupaten Boven Digoel terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang 7 (tujuh) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

a. Pimpinan : Kepala Dinas DPPKB

b. Pembantu: Sekretariat, membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :

1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten.

c. Pelaksanan: Bidang – Bidang

1. Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan, membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu:

1) Seksi Advokasi dan Pergerakan;
2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas penyiapan, pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk.

2. Bidang Keluarga Berencana membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :

1) Seksi Jaminan Pelayanan KB dan distribusi Alkon ;
2) Seksi Pembinaan Keluarga Berencana .

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana.

3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi 2 ***(dua) Seksi, yaitu :***

1) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak,Remaja dan Lansia.

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Adapun tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan, pembantu, Pelaksana dan UPTD adalah sebagai berikut :

Dinas Pengendalian penduduk dan KB memiliki Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana;
b) Pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
c) Pembinaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana;
d) Pengkoordinasian perencanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; dan
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok setiap jabatan sebagai berikut :

***a.* Pimpinan: Kepala Dinas**

- **Tugas Pokok**

  Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan KB.

- **Fungsi**

  a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

  b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

  c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

  d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya**.**

b. **Pembantu : Sekretaris**

- **Tugas Pokok**

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

- **Fungsi**

  a) merumuskan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan: merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;

  b) merumuskan kebijakan pelayanan administratif dinas;

  c) merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan: merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

  d) merumuskan pengkoordinasiaan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;

  e) merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset dinas;

  f) merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.merumuskan kebijakan pengkoordinasian penyusunan

dan penyampaian bahan pelaksanaan tugas Dinas;mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

g) pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

h) pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

b.1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

- **Tugas Pokok**

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset Dinas;

- **Fungsi**

a) menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, programkerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas;

b) mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Dinas;

c) melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan LAKIP serta penyiapan bahan bahan LPPD Dinas;

d) mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas;

e) melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;

f) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;

g) melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;

h) merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;

i) melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;

j) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;

k) mengkoordinasikan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;

l) melaksanakankonsultasi penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;

m) melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;

n) melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;

o) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

p) melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana, program kerja dan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;

q) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- **Tugas Pokok**

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian dinas.

- **Fungsi**

a) menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian;

b) melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;

c) melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;

d) melaksanakan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;

e) melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas;

f) melaksanakan, penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

g) melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas;

h) melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;

i) melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

j) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;

k) melaksanakanperencanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;

l) menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;

m) melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan;

n) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

o) menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dinas;

p) menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai,karis/karsu, taspen, BPJS dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

q) menyusun dan menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;

r) fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;

s) menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi cuti pegawai;

t) pelaksanaan penyusunan administrasi DUK, sumpah/janji pegawai;

u) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

v) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;

w) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

a. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan

- **Tugas Pokok**

  Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan.

- **Fungsi**

  a) Penyusunan rencana kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;

  b) penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan;

  c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakkan;

  d) Penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kristeria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advikasi dan pergerakkan;

e) Penyiapan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

f) Penyiapan pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten;

g) Penyiapan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

h) Penyiapan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyulu KB (PKB/PLKB)

i) Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakkan;

j) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakkan;

k) Penyiapan pelaksanaan kordinasi dalam pelaksanaan tugas;dan

l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

c.1. Seksi Advokasi dan Pergerakan

- **Tugas Pokok**

Kepala Seksi Adovokasi dan Pergerakkan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanakan program adovokasi dan pergerakkan, menyiapkan bahan pembinaan, pembibingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan pergerakkan serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

- **Fungsi**

a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi advokasi dan pergerakkan;

b) Mengkordinasikan pelaksanaan Advokasi bidang pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local;

c) Menyusun bahan advokasi pengendalian penduduk dan KB;

d) Melaksanakan advokasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;

e) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait,tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam pelaksanaan advokasi dan komunikasi pengendalian penduduk dan KB;

f) Merencanakan sarana dan prasarana informasi dan edukasi pengendalian Penduduk;

g) Menyusun materi/bahan pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan local;dan

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c.2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

- **Tugas Pokok**

Kepala Seksi Penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanakan program, menyiapkan bahan pembinaan, pembibingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

- **Fungsi**

a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi Penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB

b) Menyusun Konsep pendayagunaan tenaga penyuluh kb/petugas lapangan KB;

c) Menyusun bahan monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh KB /petugas lapangan KB (PKB/PLKB);

d) Melaksanakan pembinaan tenaga PKB/PLKB dalam rangka pendayagunaan PKB/PLKB;

e) Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan serta monitoring dan evaluasi tenaga Lini Lapangan;

f) Memberikan fasilitasi dibidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi;

g) Mengevaluasi hasil bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengembangan serta monitoring dan evaluasi;

h) Penyusunan Instrumen pengembangan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PKB/PLKB;

i) Menyusun bahan pelaksanaan penyuluhan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya local.

j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c.3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

- **Tugas Pokok**

  Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanakan program, menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga, serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

- **Fungsi**

  a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

  b) Menyusun bahan layanan data dan informasi perkiraan pengendalian penduduk;

  c) Melaksanakan Pengolahan, Analisis data kependudukan dan keluarga berencana;

  d) Melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;

  e) Menganalisis dan mengkaji proyeksi perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;

  f) Menyusun profil pengendalian penduduk;

  g) Melakukan analisis dampak kependudukan terhadap pembangunan daerah;

  h) Menyusun bahan penetapan sasaran pengendalian penduduk;

  i) Menyusun bahan dan melaksanakan sosialisasi pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk;

j) Menyusun bahan monitoring dan evaluasi perkembangan peta perkiraan pengendalian penduduk;

k) Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;dan

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang.

D. Bidang Keluarga Berencana

- **Tugas Pokok**

Kepala Bidang Keluarga Berencana, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana.

- **Fungsi**

a) Penyusunan rencana kegiatan bidang keluarga berencana;

b) Penyiapan perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana;

c) Penyiapan pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;

d) Penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang Keluarga Berencana;

e) Penyiapan pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;

f) Penyiapan pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten;

g) Penyiapan pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten;

h) Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana;

i) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga berencana;

j) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan

k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas

d.1. Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat Kontrasepsi

- **Tugas Pokok**

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat Kontrasepsi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan

dan pelaksanakan program, menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB dan distribusi alat kontrasepsi, serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

- **Fungsi**

a) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi jaminan pelayanan KB dan Distribusi alat kontrasepsi;

b) Menyiapkan bahan kordinasi pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alkon;

c) Melaksanakan kegiatan layanan sarana dan prasarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alkon serta pelayanan KB;

d) Menyusun bahan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelayanan KB;

e) Melaksanakan kerja sama dengan mitra kerja dalam pelayanan KB;

f) Pemenuhan alat kotrasepsi bagi peserta KB baru dan peserta KB aktif ;

g) Mengkordinasikan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber - KB;

h) Penggerakan Pelayanan MKJP;

i) Meningkatkan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak (KHIBA) dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi;

j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

d.2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan kesertaan KB

- **Tugas Pokok**

Kepala Pembinaan dan Peningkatan kesertaan KB, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanakan program, menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan KB, serta membuat laporan pelaksanaan tugas;

- **Fungsi**

a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi pembinaan dan peningkatan Kesertaan ber KB;

b) Menyusun bahan kordinasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber - KB;

c) Menyusun konsep kemitraan dibidang pembinaan kesertaan ber - KB;

d) Meningkatkan jejaringan kerjasama dengan mitra kerja dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber - KB;

e) Melaksanakan Penggerakan mitra kerja dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber - KB; dan

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

b. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- **Tugas Pokok**

Menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga;

- **Fungsi**

a) Penyusunan rencana kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

b) Penyiapan perumusan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

c) Penyiapan pelaksanaan Norma, standar, Prosedur dan Kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

d) Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan keluarga

e) Penyiapan pelakanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro;

f) Pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

g) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;

h) Penyiapan pelaksanan kordinasi dalam pelaksanaan tugas;

i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

e.1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

- **Tugas Pokok**

Menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanakan program, menyiapkan bahan pembinaan ,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera, serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

- **Fungsi**

a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi pemberdayaan keluarga sejahtera;

b) Menyusun bahan kordinasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan pemberdayaan keluarga sejahtera;

c) Menyusun konsep kemitraan dalam pemberdayaan keluarga sejahtera;

d) Penyusunan program pengembangan kelompok usaha ekonomi keluarga;

e) Menyusun bahan pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga;

f) Menyusun bahan pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga ;

g) Melaksanakan evaluasi program kelompok usaha ekonomi keluarga ;

h) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan dan pengembangan program pemberdayaan keluarga sejahtera;

i) Meningkatkan jejaring kerja sama dengan mitra kerja dalam pembinaan pemberdayaan keluarga sejahtera ;

j) Melaksanakan penggerakkan mitra kerja dalam pembinaan pemberdayaan keluarga sejahtera .

k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

e.2. Seksi Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja, dan Lansia

- **Tugas Pokok**

  Menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanakan program, menyiapkan bahan pembinaan ,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja, dan Lansia, serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

- **Fungsi**

  a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi bina ketahanan keluarga balita,anak, remaja dan lansia;

  b) Menyusun dan mengembangkan Pembangunan Keluarga melalui bina keluarga balita dan anak;

  c) Menyusun program pembinaan keluarga lansia;

  d) Melaksanakan pengembangan kelompok bina ketahanan remaja jalur pendidikan;

  e) Melaksanakan pengembangan kelompok bina ketahanan remaja jalur masyarakat;

  f) Menyusun bahan kordinasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga melalui bina ketahanan keluarga balita,anak, remaja, dan Lansia;

  g) Menyusun konsep kemitraan dalam bina ketahanan keluarga;

  h) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peninkgatan dan pengembangan program bina ketahanan keluarga;

  i) Meningkatkan jejaring kerja sama dengan mitra kerja dalam pembinaan bina ketahanan keluarga ;

  j) Melaksanakan penggerakkan mitra kerja dalam pembinaan bina ketahanan keluarga’

  k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

c. Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel

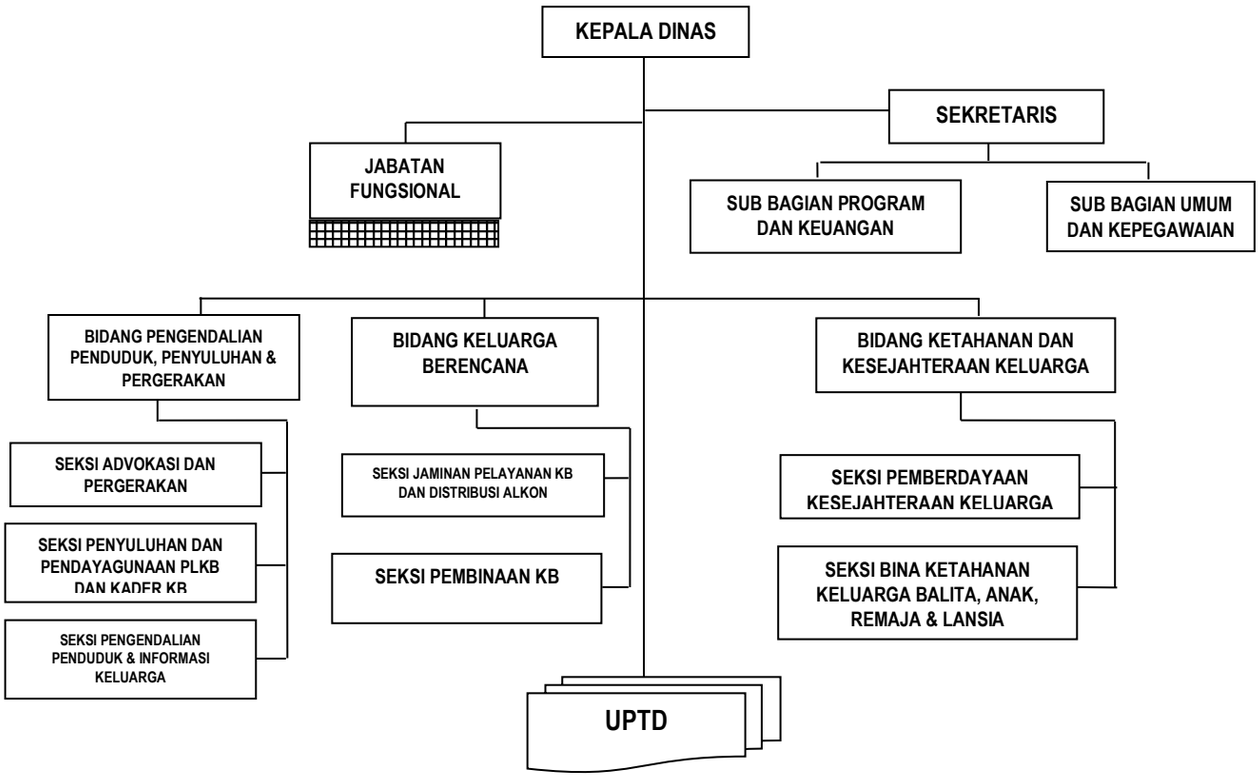

2.2 Sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel berjumlah 49 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 16 orang, CPNS sebanyak 13 dan Tenaga Kontrak/Honorer sebanyak 22 orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel berikut ;

Tabel 2.2.1.a

Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	TK	Total
ASN	1	8	4	3				16
CPNS		13						13
KONTRAK		6	7	9				22

Tabel 2.2.1.b

Jabatan Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	TK	Total
Struktural	1	8	4					13
Fungsional								
Staff				3				3

Tabel 2.2.1.c

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah orang
IV c	1
IV.b	0
IV.a	0
III.d	7
III.c	5

III.b	0
III.a	13
II.d	0
II.c	3
II.b	0
II.a	0
Total	29

Tabel 2.2.1.d

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

	Perempuan	Laki – Laki	Total
ASN	12	4	16
CPNS	5	8	13
KONTRAK	19	8	27

Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur DPPKB cukup memadai dibanding dengan bidang tugas yang harus dikerjakan, sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih optimal.

Memperlancar pelaksanaan tugas-tugas, DPPKB Kabupaten Boven Digoel dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya, melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

2.2.2. Perlengkapan

Keadaan perlengkapan yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana Kabupaten Boven Digoel dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.a

Jumlah Perangkat Komputer

No.	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Komputer	15	Unit	
2	Printer	7	unit	

Tabel 2.2.2.b

Perangkat Lunak

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Laptop	4	Unit	

Tabel 2.2.2.c

Jumlah Sarana Pendukung

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Meja kerja Biro	2	Unit	
2	Meja Kerja stengah Biro	15	Unit	
3	Kursi Hidrolik	2	Unit	
4	Kursi Kerja	15	Unit	
5	Sofa	1	Set	
6	Lemari Arsip	2	Unit	

7	AC	3	Unit	
8	TV	2	Unit	
9	Kulkas	1	Unit	
10	Dispenser	1	Unit	
11	Piring , gelas	5	Lusin	
13	Baki	4	Buah	
14	Mangkuk	4	Lusin	
15	Ketel listrik	2	Unit	
16	Gorden	15	set	
17	Taplak meja	5	set	
18	Sapu ijuk, sapu lidi	5	Buah	
19	Tempat sampah	8	Buah	
20	Tangkai pel	10	Buah	
21	Kemoceng/ sula	5	Buah	
22	Sikat wc	8	buah	
23	Keset kaki, serbet	20	Buah	

Fasilitas yang ada merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPPKB Kabupaten Boven Digoel. Sarana dan prasarana yang tersedia pada DPPKB Kabupaten Boven Digoel, belanja barang/ aset DPPKB diperoleh dari 2 (dua) sumber OPD yaitu belanja Aset yang lama dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB (seksi KB) dan belanja aset baru dari DPPKB Kabupaten Boven Digoel. Sarana dan prasarana tersebut merupakan aset DPPKB dari belanja modal DPPKB Kabupaten Boven Digoel, aset lama dan baru yang secara umum terdiri dari :

1. Gedung Alat Kontrasepsi : 1 bangunan
2. Gedung balai penyuluh : 4 bangunan
3. Kendaraan roda 2 : 20 unit

2.2.3 Keuangan

Pagu Anggaran yang di berikan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 11.324.988.091,00 (Sebelas miliyar tiga ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus depalan puluh delapan ribu Sembilan puluh satu rupiah) dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut berikut;

Tabel 2.2.3.a

Pagu Anggaran

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Boven Digoel

Tahun Anggaran 2021

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Ket
2021	11.324.988.091,00	10,457.054.744,00	92,34%	-

Tabel 2.2.3.b

Realisasi kegiatan

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Boven Digoel

Tahun Anggaran 2021

NO	KAGIATAN	REALISASI %	TAHUN	KET
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99%	2021	Dilaksanakan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2021	Dilaksanakan
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81,97%	2021	Dilaksanakan
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	2021	Dilaksanakan
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	2021	Dilaksanakan
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	89,19%	2021	Dilaksanakan

7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	2021	Dilaksanakan
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	2021	Dilaksanakan
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	2021	Dilakasanakan
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	2021	Dilaksanakan
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	2021	Dilaksanakan
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,89%	2021	Dilaksanakan
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2021	Dilaksanakan
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	2021	Dilaksanakan
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93,16%	2021	Dilaksanakan
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	2021	Dilaksanakan
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	2021	Dilaksanakan
18	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	96,02%	2021	Dilaksanakan
19	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	100%	2021	Dilaksanakan
20	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	99,81%	2021	Dilaksanakan
21	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program BANGGA KENCANA di Sektor Lain	100%	2021	Dilaksanakan
22	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	98,23%	2021	Dilaksanakan
23	Advokasi Program BANGGA KENCANA kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	98,68%	2021	Dilaksanakan
24	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program BANGGA KENCANA	97,39	2021	Dilaksanakan
25	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan BANGGA KENCANA	95,53%	2021	Dilaksanakan
26	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	100%	2021	Dilaksanakan

27	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	99,87%	2021	Dilaksanakan
28	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	2021	Dilaksanakan
29	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100%	2021	Dilaksanakan
30	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	96,08%	2021	Dilaksanakan
31	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pem	50,18	2021	Dilaksanakan
32	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%	2021	Dilaksanakan
33	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%	2021	Dilaksanakan
34	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	99,25	2021	Dilaksanakan
35	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	99,84%	2021	Dilaksanakan
36	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	100%	2021	Dilaksanakan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Secara umum kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sudah dapat di evaluasi walupun masih dikatakan OPD baru dalam Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel dan juga berkaitan dengan fungsi Perangkat daerah antara lain sebagai berikut;

a. Pembinaan, Pembimbingan, dan fasilitas pelaksanaan kebijakan nasional di Bidang Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

b. Pembinaan, Pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
e. Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
f. Pelaksanaan tugas administrasi umum;
g. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; perumusan kebijakan teknis, manajemen informasi dan pengembangan regulasi termasuk pelaksanaan kesekretariatan dinas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel pada tahun sebelumnya. Untuk menunjukan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel dengan kinerja yang dibutuhkan.

Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam tahun yang sama. Pencapaian target pembangunan BANGGA KENCANA berkontribusi pula dalam pencapaian ukuran pembangunan manusia (Human Development Index) dan tujuan pembangunan SDGes (Sustainable Development Goals).

Kinerja berkaitan dengan upaya Program BANGGA KENCANA antara lain terlihat dari indikator atau capaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada penjelasan berikut ini;

Memperluas Jangkauan pelayanan KB dan akses di seluruh Kabupaten Boven Digoel

Mengingat kondisi objektif geografis dari Kabupaten Boven Digoel yang jangkauannya sering terkendala dalam melakukan kegiatan pelayanan KB dan akses terhadap masyarakat, maka perlu melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan intensitas pelayanan KB dengan pendekatan kontekstual(keruangan dan wilayah adat) baik secara statis maupun pelayanan secara mobile;
2. Peningkatan layanan akseptor KB secara sinergis berdasarkan karakteristik penduduk dan jenis alat kontrasepsi;
3. Penguatan jejaring dan komitmen tenaga di tingkat lini lapangan untuk pelaksanaan program KB di kecamatan dan desa / kampung atau kelurahan;
4. Pemberdayaan dan penguatan peran actor dan potensi local sebagai penggerak pelaksanaan program KB di tingkat desa/kampung.

Meningkatkan kualitas pelayanan KB

Secara normative kualitas pelayanan KB di Kabupaten Boven Digoel sudah cukup baik , hal ini salah satu pendorongnya adalah pada tahun 2017 BKKBN bekerjasama dengan P2KS Provinsi Papua telah melatih tenaga medis tentang pemasangan kontrasepsi implant dan IUD bagi bidan. Untuk itu sebagai tindak lanjut penggarapan program perlu peningkatan kualitas pelayanan melalui

1. Menyelenggarakan pelatihan pemasangan CTU dan konseling bagi bidan se- Kabupaten Boven Digoel;
2. Menyelenggarakan penyuluhan MOP dan MOW bagi (mitra kerja) se-Kabupaten Boven Digoel;
3. Menyelenggarakan pelatihan bagi actor local di tingkat desa / kampung sebagai penggerak program BANGGA KENCANA;
4. Mendistribusikan dan menjamin ketersediaan alkon secara merata sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik calon peserta KB di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Menguatkan Advokasi dan KIE KB

Pemahaman tentang program KB bagi masyarakat di Kabupaten Boven Digoel masih kurang. Hal ini berkaitan dengan terlalu luasnya wilayah yang akan di garap, sehingga

kegiatan advokasi dan KIE terhadap tokoh formal maupun non formal di tingkat kabupaten perlu di tingkatkan. Untuk meningkatkan jangkauan advokasi dan KIE di daerah, maka perlu kegiatan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Komitmen Lintas sector dan pimpinan daerah, pimpinan lembaga non formal (adat, agama dan perempuan) tentang penting dan strategisnya program BANGGA KENCANA dalam mewujudkan generasi emas papua;
2. Penggalangan sekutu dalam membangun kemitraan yang mendorong / mendukung pelaksanaan program BANGGA KENCANA dalam mewujudkan generasi emas papua;
3. Peningkatan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda untuk menjadi leading sector dalam menjelaskan tentang program BANGGA KENCANA.

Meningkatkan aktifitas ketahanan keluarga

1. Meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
   a. Peningkatan advokasi, KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah, LSOM, instansi terkait dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak di inginkan pada remaja;
   b. Peningkatan peran dan fungsi serta kualitas dan kuantitas kegiatan PIK remaja/ Mahasiswa (PIK – R/M) dengan mendorong remaja atau mahasiswa untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan memperoleh pendidikan, menjaga kesehatan ,meningkatkan ketrampilan hidup dan jiwa kepemimpinan;
   c. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan remaja.Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM kader BKR dalam memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orang tua.
2. Meningkatkan Peran dan Fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia;
   a. Penyuluhan tentang pemahaman keluarga/ orang tua mengenai penting nya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB, BKR, BKL) serta penguatan 8 fungsi keluarga (agama, social, cinta Kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan) berdasarkan pendekatan wilayah adat di provinsi papua;

b. Meningkatkan pengetahuan serta penyuluhan tentang peran dan tugas orang tua dalam tumbuh kembang balita, anak dan remaja;

c. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam perawatan dan pemberdayaan lansia.

3. Mengembangkan dan memantapkan pemberdayaan keluarga;

a. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya secara mandiri melalui penyelenggaraan advokasi KIE berbasis kontekstual tentang akses terhadap sumber daya ekonomi bagi keluarga;

b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan berwirausaha bagi keluarga pra sejahtera khususnya anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) melalui sinergisitas dengan pihak lain .

4. Fasilitas kegiatan dan pembentukan pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS); Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan data dan informasi kependudukan dan KB, konsultasi dan konseling balita dan anak, layanan konseling bagi keluarga remaja dan remaja, konseling pranikah, konseling KB dan kesehatan reproduksi , konseling keluarga harmonis, konseling keluarga lansia dan lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga melalui balai penyuluhan KB yang ada tiap tingkat distrik

Meningkatkan ketersediaan kualitas data informasi kependudukan yang memadai

a. Penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu

b. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi terpadu

c. Peningkatan desiminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan terutama sensus dan survey bagi seluruh pihak termasuk swasta dan akademisi

d. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan yang bersumber dari registrasi penduduk.

e. Peningkatan koordinasi termasuk fasilitas seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

f. Memperkuat penelitian dan pengembangan pengelolaan program BANGGA KENCANA

a) Penguatan penelitian Kependudukan, KB dan ketahanan keluarga

b) Penyediaan dan publikasi hasil penelitian kependudukan, KB dan ketahanan keluarga

c) Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang BANGGA KENCANA

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Program pelayanan BANGGA KENCANA yang dilaksanakan secara berkesinambungan sedikit banyak telah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian dalam penyelenggaraan program BANGGA KENCANA masih terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

1. Jumlah penduduk semakin bertambah dan persebaran tidak merata dilihat dari kepadatan penduduk berbeda antar Distrik. Hal ini menuntut penyediaan mutu dan kualitas fasyankes sesuai standar yang mudah diakses oleh setiap penduduk.
2. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesehatan sebagai mitra kerja OPD DPPKB, baik dari bagi segi jumlah, jenis SDM, kualitas dan persebaran di fasilitas pelayanan kesehatan dan Balai Penyuluh KB, yang berdampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (BANGGA KENCANA) yang berkualitas.
3. Perilaku dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti MKJP masih rendah.
4. Kasus penyakit yang menyebabkan kematian ibu dan bayi serta gizi buruk diantaranya disebabkan oleh perdarahan, preeklampsi, BBLR, Gizi Buruk Balita, Bumil KEK dan Anemia. Kasus penyakit non infeksi lainnya merupakan penyebab tidak langsung kematian ibu adalah keadaan empat terlalu yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak. Penyebab tidak langsung lainnya adalah rendahnya pemberian Fe, pola makan dan ketersediaan pangan serta promosi kesehatan, tingkat pengetahuan, dukungan data yang belum optimal, mobilitas yang tinggi serta tingkat kepedulian masyarakat yang rendah.

Adapun beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja program BANGGA KENCANA antara lain:

1. Dukungan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan propinsi dalam program pelayanan Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga. Adanya komitmen pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pelayanan publik Program

BANGGA KENCANA diantaranya adalah ketersediaan lingkungan, tatanan fasilitas baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, ketersediaan sumber daya program BANGGA KENCANA yang adil dan merata bagi seluruh masyrakat, ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan Balai Penyuluh. Adanya dukungan anggaran program BANGGA KENCANA dari pemerinntah Daerah (APBD Kabupaten Boven Digoel), Pemerintah Pusat (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), Pemerintah Propinsi (APBD Propinsi) maupun anggaran hibah/bantuan luar negeri;

2. Adanya peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, diantaranya:
   a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
   b. Undang-Undang Dasar 19545 pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;
   c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
   d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
   e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
   f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
   g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Terdapat komitmen global, regional dan nasional terkait BANGGA KENCANA, mewajibkan pemerintah memberikan perhatian terhadap pemecahan masalah

BANGGA KENCANA; Komitmen pemerintah terhadap pembangunan kesehatan diimplementasikan pada pelaksanaan pembangunan Nasional dengan menggunakan konsep paradigma sehat, yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999, sebagai “Gerakan Pembangunan yang Berwawasan Kesehatan”. paradigma sehat merupakan cara pandang pola pikir atau model pembangunan kesehatan yang melihat masalah BANGGA KENCANA saling berkait dan mempengaruhi banyak faktor yang bersifat lintas sektor dan upayanya lebih diarahkan pada Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga, bukan hanya penyembuhan orang sakit tetapi saling menjaga yang sehat untuk menjadi tetap sehat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Boven Digoel merupakan Kabupaten baru yang di bentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2002, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten induk Merauke, bersamaan dengan sejumlah kabupaten yang berada di wilayah selatan Papua. Jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel (Tahun 2021 = 64.643 Jiwa) . Topografi Kabupaten Boven Digoel sebagian besar merupakan daerah hutan, rawa, dan dataran tinggi, didiami oleh 5 suku, dengan pola hidup masyarakat sebagian besar merupakan masyarakat perkampungan atau pedesaan. Berdasarkan kondisi tersebut, sangat berpangaruh pada kompleksitas permasalahan yang muncul.

Beragam permasalahan kependudukan yang muncul, sangat membutuhkan penanganan serius, sehingga menjadikan semakin beratnya tanggungjawab yang diemban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Beberapa permasalahan kependudukan yang muncul, yaitu :

1. Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program BANGGA KENCANA, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran;
2. Masih tingginya jumlah anak yang di inginkan dari setiap keluarga di Papua, yaitu sekitar 2,4 sampai dengan 2,5 anak, sementara angka kelahiran total sebesar 3,50.
3. Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program BANGGA KENCANA baik antar provinsi, antara wilayah perdesaan perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga.
4. Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB;
5. Belum optimalnya kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB = Bina Ketahanan Balita, BKR = Bina Ketahanan Remaja dan BKL = Bina Ketahanan Lansia) dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penggerakan program KKB.Penyebab permasalahan tersebut akibat munculnya opini di masyarakat dalam memahami

program KKB, bahwa urusan program KKB merupakan urusan perempuan. Pemahaman tersebut perlu diluruskan, sebab pembangunan BANGGA KENCANA pada dasarnya adalah pembangunan berbasis keluarga dan masyarakat, yang menyangkut berbagai aspek pembangunan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat berkewajiban untuk merubah pola fikir tersebut, yang dilaksanakan melalui penggalangan partisipasi masyarakat didukung oleh segenap pemangku kebijakan. Pada sisi lain, terdapat permasalahan masih rendahnya kuantitas dan kualitas Institusi Masyarakat Perdesaan (PPKBD dan Sub PPKBD), sebagai ujung tombak pembangunan BANGGA KENCANA. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), maka pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga harus dilaksanakan secara beriringan, yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat, apalagi berdasarkan fakta di lapangan bahwa perbandingan jumlah petugas lapangan KB (PKB/PLKB) dengan wilayah binaan sudah tidak proporsional lagi. Saat ini, seorang PKB/PLKB harus membina 3-4 desa/kelurahan, idealnya sesuai amanah Standar Pelayanan Minimal (SPM) program KKB Nasional adalah setiap PKB/PLKB membina 2 (Dua) desa/kelurahan. Peran institusi masyarakat perdesaan (IMP) menjadi sangat penting dan strategis.

Perkembangan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap pembangunan BANGGA KENCANA di Kabupaten Boven Digoel. Guna menunjang keberhasilan pembangunan BANGGA KENCANA, diperlukan perumusan strategi pembangunan yang responsif terhadap berbagai permasalahan kependudukan dan Keluarga Berencana, sekaligus mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang yang ada.

A. Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan

Tantangan berdasarkan kondisi lingkungan strategis pembangunan BANGGA KENCANA, sebagai berikut :

a. Tingginya Unmet Need

Penyebab permasalahan tersebut: (1) Tingginya perkawinan usia muda (usia <20 tahun bagi wanita); (2) rendahnya kepesertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);

(3) Rendahnya kepesertaan KB Pria; (4) Tingginya PUS Resiko Tinggi (Risti) belum ber KB.

b. Semakin deras dan terbukanya arus informasi negatif melalui berbagai media informasi (terutama dari internet), yang berpengaruh pada terjadinya peningkatan pergaulan bebas (sex bebas) dan berbagai kasus narkoba.
c. Masih tingginya jumlah Keluarga Pra Sejahtera.
d. Rendahnya partisipasi masyarakat dan kualitas kader KB dalam pembangunan BANGGA KENCANA.

B. Peluang

Peluang berdasarkan kondisi lingkungan strategis, sebagai berikut :

1) Tersedianya sumberdaya manusia eksternal pengelola program KKB (PPKBD, Sub PPKBD, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat) yang memadai.
2) Tersedianya tenaga dan tempat Pelayanan KB yang memadai di setiap kecamatan dan desa/kelurahan.
3) Semakin meningkatnya komitmen stakeholder baik dari pemerintah dan swasta.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilig

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2021-2025 menyatakan bahwa Visi Kabupaten Boven Digoel adalah "***Terwujudnya Boven Digoel Yang Bersatu, Sejahtera Dan Berdaya Saing Di Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan Berbasis Pertanian,Parawisata dan Perikanan".***

Berdasarkan Visi tersebut di atas, posisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung Misi Ke 1 (satu) yaitu "***Meningkatkan Kesehatan ibu,anak keluarga berencana (KB), dan perbaikan gizi masyarakat ".***

3.2.1. Keterkaitan Visi-Misi daerah dan OPD DPPKB

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah (kabinet kerja) 2021-2025, seluruh kementrian / lembaga di arahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi pembangunan nasional dan memperhatikan visi pembangunan kabupaten Boven Digoel maka Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana menetapkan visi kelembagaan dan program menjadi " LEMBAGA YANG HANDAL DALAM MEWUJUDKAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG SERTA KELUARGA BERKUALITAS MENUJU BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN MAMPU BERDAYA SAING.

Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui program BANGGA KENCANA mendorong perwujudan ;

1. Penduduk tumbuh seimbang merupakan cita- cita besar yang akan di capai oleh DPPKB melalui Distrik yang ada di kampung-kampung yang di tandai dengan Total Fertility Rate/ angka kelahiran total (TFR)= 2,1 dan Net Reproduction Rate/ angka reproduksi neto (NRR)= 1
2. Papua Bersatu, Boven Digoel merupakan kabupaten yang memiliki keanekragaman budaya. Keragaman ini sering kali menjadi akar timbulnya konflik antar suku, ras dan agama. Untuk mengatasi munculnya hambatan, seluruh masyarakat, pihak swasta, dan Pemerintah atau stakeholder Kabupaten Boven Digoel harus mengalahkan ego masing-masing, serta bersatu padu untuk meningkatkan kepedulian agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Boven Digoel. Untuk lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengajak masyarakat agar mempererat persatuan untuk membangun daerahnya agar lebih maju dan sejahtera, termasuk dalam program BANGGA KENCANA dengan memberikan ruang untuk mengaktualisasikan diri dan mengambil peran sesuai dengan daya dukung lingkungan secara kontekstual.
3. Papua Sejahtera, Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah untuk mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

   Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan nafas baru bagi upaya membangun keterlibatan masyarakat Kabupaten Boven Digoel, dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci pelaksanaan otonomi daerah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah, dan memiliki dampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
4. Papua Berdaya Saing

   Pembangunan Kabupaten Boven Digoel dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kualitas

hidup masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Melalui elemen ini, pemerintah ingin mewujudkan keseimbangan antara kemandirian pembangunan dengan aspek daya saing. Daerah yang berdaya saing dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten dengan berbagai program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sampai saat ini kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk dapat merealisasikan cita-cita tersebut, pemerintah harus mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri.

Pengembangan kemandirian ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan merupakan konsep dasar yang akan menunjang pembangunan Kabupaten Boven Digoel. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing dan sumberdaya yang dimiliki. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah di Kabupaten Boven Digoel.

Dalam rangka mendukung upaya perwujudan Visi Kelembagaan dan program kependudukan, KB dan Pembngunan Keluarga tersebut dilakukan melalui Misi sebagai berikut;

1. Mengarusutamakan Pembangunan berwawasan Kependudukan;
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga dan Ketahanan Keluarga;
4. Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara Konsisten, serta;
5. Mengembangkan advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Serta jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA);
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) undang-undang nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan lampiran . Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, DPPKB mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan KB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ketentuan tersebut, DPPKB sesuai Keputusan Kepala Daerah nomor 66 Tahun 2016

tentang Organisasi dan tata kerja DPPKB pasal 2, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi;

a. Pembinaan, Pembimbingan, dan fasilitas pelaksanaan kebijakan nasional di Bidang Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
b. Pembinaan, Pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
e. Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
f. Pelaksanaan tugas administrasi umum;
g. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting yaitu ; pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah , struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan Kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan.

Dalam rangka memperkuat implementasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (BANGGA KENCANA), terutama yang meliputi ke-5 (lima) aspek di atas, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman tujuan dan sasaran strategis DPPKB yang harus bermuara pada visi Bupati 2021-2025 yaitu Boven Digoel "*Terwujudnya Boven Digoel Yang Bersatu, Sejahtera Dan Berdaya Saing Di Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan Berbasis Pertanian,Parawisata dan Perikanan"*.

4.1 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kelembagaan dan program kependudukan, KB dan Pembangunan keluarga, serta sesuai dengan tugas / fungsi DPPKB Kabupaten Boven Digoel maka di tetapkan tujuan;

1. Meningkatkan pemahaman kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan;
2. Menguatkan akses pelayanan KB yang merata, berkualitas dengan pola pendekatan Kesehatan Reproduksi dan pengaturan Jarak kelahiran melalui program 1000 hari pertama kehidupan;
3. Meningkatkan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun non MKJP;
4. Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi remaja;
5. Meningkatkan komitmen stakeholder dan mitra kerja terhadap program BANGGA KENCANA;
6. Menguatkan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang keluarga berencana;
    1. Menerapkan budaya kerja organisasi, Cerdas, tangguh, kerjasama, integritas, dan ikhlas;

2. Menyiapkan kualitas Sumber Daya Manusia sejak dini menuju perwujudan generasi emas Papua.

4.2 SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan visi, misi dan tujuan tersebut di atas, maka sasaran strategis program kependudukan , KB dan pembangunan keluarga Kabupaten Boven Digoel tahun 2021 – 2022 sebagai berikut;

1. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun);
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR);
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (unmet need);
4. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun);
5. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun);
6. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan MKJP.

<u>Kegiatan Strategis;</u>

1. **Pelayanan Program Administrasi Perkantoran**
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas atau Operasional
   4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   10. Penyediaan bahan logistic kantor
   11. Penyediaan makanan dan minuman
   12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
   1. Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
   2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor
   4. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

   1. Pendidikan dan pelatihan formal
   2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
   3. Bimbingan teknis pengembangan standar operasional prosedur OPD

4. **Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

   1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja OPD
   2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
   3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
   4. Penyusunan Rencana Kerja dan RKA-SKPD

5. **Program Keluarga Berencana**

   1. Pembinaan Keluarga Berencana
   2. Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin (OTSUS)
   3. Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
   4. Pembinaan Kampung KB
   5. Biaya Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan
   6. Biaya Operasional Pergerakan di Kampung KB
   7. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (OTSUS)
   8. Desa Stunting (BOKB)
   9. Penyusunan Raperda Kampung KB
   10. Penggandaan Sarana KIE, KIE KIT dan Media Lini Lapangan
   11. Penyediaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB
   12. Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB
   13. Pembangunan/ Alih Fungsi/ Pengembangan Penyuluhan KB
   14. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit (DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB)

6. **Program Pelayanan Kontrasepsi**

   1. Pelayanan Pemasangan Kontasepsi KB.
   2. Sosialisasi Model Pelayanan MKJP Kepada Mitra Kerja Jalur swasta dan Pemerintah

7. **Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS**

   1. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV AIDS

8. **Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu-PADU**

1. Workshop dan TOT bagi pengelola kelompok BKB Posyandu Padu

9. Program Advokasi dan KIE

1. Dukungan Media KIE dan Manajeman
2. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)

10. Program Keluarga Kecil Yang Berkualitas

1. Pelatihan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
2. Pembinaan Keluarga Kecil yang Berkualitas

11. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Biaya Operasional Program Oleh Kader

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Boven Digoel pada akhir tahun 2021- 2025, dan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, maka Arah kebijakan dan strategi daerah dalam periode 2021-2025 dimana yang menjadi fokus dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana selama lima tahun kedepan adalah;

a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
b. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan
   alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pemberdayaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB ;
c. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan K, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;
d. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB;
e. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya wajib belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran usia remaja;

f. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun menggunakan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip rasional , efektif dan efisien;

g. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;

h. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB;

i. Penguatan bidang KKB melalui penyediaan informasi dan hasil penelitian / kajian kependudukan, keluarga berencana dan ketahanan keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan BANGGA KENCANA .

5.2 Arah Kebijakan dan strategi penggarapan program BANGGA KENCANA di Kabupaten Boven Digoel

Sesuai isi yang terkandung dalam undang undang nomor 52 tahun 2009 dimana mengamatkan bahwa titik sentral dalam pembangunan adalah penduduk. Untuk mengimplementasikan atau mencapai sasaran yang akan dicapai, maka perlu disusun kebijakan dan strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Boven Digoel sebagai berikut ;

a. Memperluas jangkauan pelayanan KB dan akses di seluruh Distrik se-Kabupaten Boven Digoel

Mengingat kondisi obyektif geografis dari wilayah Kabupaten Boven Digoel yang jangkauannya sering terkendala dalam melakukan kegiatan pelayanan KB dan akses terhadap masyarakat, maka perlu melakukan kegiatan sebagai berikut;

1. Peningkatan intensitas pelayanan KB dengan pendekatan kontekstual (keruang dan wilayah adat) baik secara statis maupun pelayanan secara mobile
2. Peningkatan layanan akseptor KB secara sinergis berdasarkan karakteristik penduduk dan jenis alat kontrasepsi
3. Penguatan jejaring dan komitmen tenaga di tingkat lini lapangan untuk pelaksanaan program KB di Distrik dan kampung atau kelurahan
4. Pemberdayaan dan penguatan peran aktor dan potensi lokal sebagai penggerak pelaksana program KB di tingkat kampung

b. Meningkatkan kualitas pelayanan KB

Secara normatif kualitas pelayanan KB di Kabupaten Boven Digoel dikatakan telah melalui upaya upaya peningkatan kearah yang lebih baik, hal ini salah satu pendorongnya adalah pada tahun 2017 DPPKB bekerjasama dengan P2KS dan BKKBN Provinsi Papua telah melatih tenaga medis tentang pemasangan kontrasepsi Implant dan IUD bagi Bidan. Untuk itu sebagai tindaklanjut penggarapan program perlu peningkatan kualitas pelayanan melalui;

1. Menyelenggarakan pelatihan pemasangan CTU dan Konseling bagi Bidan se Kabupaten Boven Digoel;

2. Menyelenggarakan pelatihan MOP dan MOW bagi tenaga dokter se Kabupaten Boven Digoel
3. Menyelenggarakan pelatihan bagi Aktor lokal di tingkat Kampung sebagai penggerak program BANGGA KENCANA
4. Mendistribusikan dan menjamin ketersediaan Alokon secara merata sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik calon peserta KB di setiap fasilitas pelayanan kesehatan

c. Menguatkan advokasi dan KIE KB

Pemahaman tentang program KB bagi masyarakat di Kabupaten Boven Digoel masih kurang, hal ini berkaitan dengan terlalu luasnya wilayah yang akan digarap, sehingga kegiatan advokasi dan KIE terhadap tokoh formal maupun non formal di tingkat Distrik perlu di tingkatkan. Untuk meningkatkan jangkauan Advokasi dan KIE di Distrik, maka perlu kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

1. Peningkatan komitmen lintas sektor dan pimpinan daerah, pimpinan lembaga non formal (adat, agama dan perempuan) tentang penting dan strategisnya program BANGGA KENCANA dalam mewujudkan generasi emas Papua;
2. Penggalangan sekutu dalam membangun kemitraan yang mendorong / mendukung pelaksanaan program BANGGA KENCANA dalam mewujudkan generasi emas Papua;
3. Peningkatan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda untuk menjadi leading sektor dalam menjelaskan tentang program BANGGA KENCANA.

d. Meningkatkan Aktifitas ketahanan keluarga

1. Meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
   a. Peningkatan advokasi, KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah, LSO, instansi terkait dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja;
   b. Peningkatan peran dan fungsi serta kualitas dan kuantitas kegiatan PIK Remaja / Mahasiswa (PIK-R/M) dengan mendorong remaja/mahasiswa untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan memperoleh pendidikan, menjaga kesehatan, meningkatkan ketrampilan hidup dan jiwa kepemimpinan;
   c. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan remaja;
   d. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM kader BKR dalam memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orang tua.

2. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia.

   a. Penyuluhan tentang pemahaman keluarga/ orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB, BKR, BKL) serta penguatan 8 fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih,

perlindungan, reproduksi, pendidikan , ekonomi dan lingkungan) berdasarkan pendekatan wilayah adat di Kabupaten Boven Digoel;

b. Meningkatkan pengetahuan serta penyuluhan tentang peran dan tugas orang tua dalam tumbuh kembang balita, anak dan remaja;

c. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam perawatan dan pemberdayaan lansia.

3. Mengembangkan dan memantapkan pemberdayaan keluarga

   a. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya secara mandiri melalui penyelenggaraan advokasi KIE berbasis kontekstual tentang akses terhadap sumber daya ekonomi bagi keluarga;

   b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan berwirausaha bagi keluarga pra sejahtera khususnya anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) melalui sinergisitas dengan pihak lain.

4. Fasilitas kegiatan dan pembentukan pusat pelayanan keluarga Sejahtera (PPKS)

   Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan data dan informasi kependudukan dan KB, konsultasi dan konseling balita dan anak, layanan konseling bagi keluarga remaja dan remaja, konseling pranikah, konseling KB dan kesehatan reproduksi, konseling keluarga harmonis, konseling keluarga lansia dan lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga melalui balai penyuluh KB yanng ada tiap tingkat distrik.

e. Meningkatkan ketersediaan kualitas data informasi kependudukan yang memadai;

1. Penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu;
2. Peningkatan desiminasi, aksesbilitas dan pemanfatan data dan informasi kependudukan terutama sensus dan surveybagi seluruh pihak termasuk swasta dan akademisi;
3. Peningkatan diseminasi, aksesbilitas dan pemanfatan data dan informasi kependudukan yang bersumber dari registrasi penduduk;
4. Peningkatan koordinasi termasuk fasilitasi seluruh instansi dalam pemanfatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan;
5. Peningkatan kapasitas manajemen data dan informasi kependudukan.

f. Memperkuat penelitian dan pengembangan pengelolaan program BANGGA KENCANA

1. Penguatan penelitian kependudukan, KB dan ketahanan keluarga;
2. Penyediaan dan publikasi hasil penelitian kependudukan KB dan ketehanan keluarga
3. Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang BANGGA KENCANA.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

Visi :	*" BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING "*
Misi :	1. Mengarusutamakan Pembangunan berwawasan Kependudukan; 2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; 3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga dan Ketahanan Keluarga; 4. Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara Konsisten, serta; 5. Mengembangkan advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Serta jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA); 6.Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Tujuan	**Sasaran**	**Strategis**	**Arah Kebijakan**
a.Meningkatkan pemahaman kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	a.Meningkatnya pemahaman kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	1.Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun);.	a. Memperluas jangkauan pelayanan KB dan akses di seluruh Distrik se-Kabupaten Boven Digoel
			b. Meningkatkan kualitas pelayanan KB
			c. Menguatkan advokasi dan KIE KB
b.Menguatkan akses pelayanan KB yang merata, berkualitas dengan pola pendekatan Kesehatan Reproduksi dan	b.Menguatkan akses pelayanan KB yang merata, berkualitas dengan pola pendekatan Kesehatan Reproduksi	2.Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR);	d. Meningkatkan Aktifitas ketahanan keluarga
			e. Meningkatkan ketersediaan kualitas data informasi kependudukan yang memadai

pengaturan jarak kelahiran melalui program 1000 hari pertama kehidupan	dan pengaturan jarak kelahiran melalui program 1000 hari pertama kehidupan		f. Memperkuat penelitian dan pengembangan pengelolaan program BANGGA KENCANA
c.Meningkatkan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun non MKJP d.Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi remaja e.Meningkatkan komitmen stakeholder dan mitrakerja terhadap program BANGGA KENCANA f.Menguatkan tata kelola, penelitian dan pengembangan bidang keluarga berencana; g.Menerapkan budaya kerja organisasi, cerdas, tangguh, kerjasama, integritas, dan ikhlas; h.Menyiapkan kualitas Sumber daya manusia sejak dini menuju	c.Meningkatkan pembinaan peserta KB,baik menggunakan MKJP maupun non MKJP d.Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi remaja e.Meningkatkan komitmen stakeholder dan mitrakerja terhadap program BANGGA KENCANA f.Menguatkan tata kelola, penelitian dan pengembangan bidang keluarga berencana;	3.Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (unmet need); 4.Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun);	

perwujudan generasi emas papua			
	h..Menyiapkan kualitas Sumber daya manusia sejak dini menuju perwujudan generasi emas papua	5.Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun);	
		6.Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan MKJP.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Boven Digoel dalam rangka mencapai tujuan Strategis disusunlah rencana Strategis Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Pedoman tersebut adalah indikator-indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja dari program dan kegiatan, dilengkapi pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan.

Sementara itu pada bab ini juga dibahas mengenai rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaannya pada upaya pencapaian visi dan misi Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel yang berkelanjutan. Perbaikan maupun perumusan program baru/inovasi dari program tahun-tahun sebelumnya. Program akan dilanjutkan jika masih relevan dengan permasalahan pembangunan atau isu Strategis yang berkembang.

Berikut program pembangunan pelayanan berupa rencana program/kegiatan indikatif untuk periode 2021-2025.

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik;

c. Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas / operasnl;

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor;

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan;

j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

k. Penyediaan Makanan dan Minuman;

l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

b. Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional;

c. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor;

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

a. pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

a. Pendidikan dan Pelatihan formal;

b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;

c. Bimbingan teknis pengembangan standar operasiaonal prosedur OPD;

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD;

b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran ;

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

d. Penyusunan rencana kerja dan RKA- OPD;

6. PROGRAM KELUARGA BERENCANA

a. Pembinaan Keluarga Berencana;

b. Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin (OTSUS);

c. Operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;

d. Pembinaan Kampung KB;

e. Biaya Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan;

f. Biaya Operasional Penggerakan diKampung KB;

g. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu (OTSUS);

h. Desa Stunting (BOKB);

i. Penyusunan Raperda Kampung KB;

j. Pengadaan sarana KIE, KIE KIT dan Media Lini Lapangan (DAK-Reguler);

k. Penyediaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB (DAK-Reguler);

l. Pengadaan sarana kerja PKB/PLKB (DAK-Reguler);

m. Pembangunan/Alih fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB (DAK-Reguler);

n. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit (DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB);

7. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB;

b. Sosialisasi Model Pelayanan MKJP kepada mitra Kerja Jalur Swasta dan Pemerintah;

8. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

a. Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.

9. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN MASYARAKAT

a. Penyuluhan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui kelompok di Masyarakat;

b. Sosialisasi penggunaan BKB KIT.

10. PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV / AIDS

a. Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS.

11. PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB / POSYANDU / PADU

a. Workshop dan TOT bagi pengelola kelompok BKB posyandu PADU.

12. PROGRAM ADVOKASI DAN KIE

a. Dukungan media KIE dan Manajemen Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

13. PROGRAM KELUARGA KECIL YANG BERKWALITAS

a. Pelatihan Upaya peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);

b. Pembinaan keluarga kecil yang berkwalitas.

14. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. Biaya operasional program oleh kader

Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel tahun 2021-2025 dapat dilihat pada table 6.1.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Sumber Dana			Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026										
										Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	DAU	DAK	OTSUS		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya**			**4.325.884.026**		**5.064.854.391**		**5.608.244.830**		**6.169.069.312**		**6.785.976.242**		**7.464.573.864**		**35.418.602.665**					
	Tersedianya Revisi RKA SKPD, Renstra, Renja, Lakip dan Evaluasi Renja	2	14	01	2	01	Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp/tahun	99%	5.000.000	75%	5.500.000	75%	6.050.000	75%	6.655.000	75%	7.320.500	75%	8.052.550	100%	38.578.050	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah Dokumen Rencana Kerja,RKA SKPD, LAKIP, RENTRA yang dibuat 4 Dokumen																				
								Outcome : Tersedianya Dokumen Rencana Kerja,RKA SKPD, LAKIP dan RENTRA																				
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaiaan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp/tahun	100%	81.460.000	75%	5.501.100	75%	6.051.210	75%	6.656.331	75%	7.321.964	75%	8.054.160	100%	115.044.765	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disediakan 1 Laporan																				
								Outcome : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp/tahun	0%	-	75%	34.960.000	75%	38.456.000	75%	42.301.600	75%	46.531.760	75%	51.184.936	100%	213.434.296	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 12 Dokumen																				
								Outcome : Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja																				
	Terpenuhinya Data Administrasi Keuangan Yang Akuntabel	2	14	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp/tahun	81%	3.270.329.126	75%	3.446.411.781	75%	3.791.052.959	75%	4.170.158.254	75%	4.587.174.079	75%	5.045.891.486	100%	24.311.017.685	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan sebanyak 30 Orang																				
								Outcome : Tersediasanya Jasa Administrasi Keuangan																				
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp/tahun	100%	4.600.000	75%	5.000.000	75%	5.500.000	75%	6.050.000	75%	6.655.000	75%	7.320.500	100%	35.125.500	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disediakan 1 Laporan																				
								Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun																				
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp/tahun	100%	4.600.000	0%	-	75%	5.060.000	75%	5.566.000	75%	6.122.600	75%	6.734.860	100%	28.083.460	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Tersedia 1 Laporan																				
								Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran																				
	Peningkatan Pemahaman Sumber Daya Aparatur	2	14	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp/tahun	100%	263.400.000	75%	320.000.000	75%	352.000.000	75%	387.200.000	75%	425.920.000	75%	468.512.000	100%	2.217.032.000	√			DPPKB	Luar daerah
								Output : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Sebanyak 3 Orang																				
								Outcome : Terlaksananya Pegawai Mengikuti Bimbingan Teknis																				
	Terlaksananya Kegiatan Perkantoran	2	14	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp/tahun	0%	753.000	75%	1.827.500	75%	2.010.250	75%	2.211.275	75%	2.432.402	75%	2.675.642	100%	11.910.069	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Kantor yang disediakan Sebanyak 30 Buah																				
								Outcome : Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Kantor																				
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp/tahun	100%	7.044.400	75%	7.565.000	75%	8.321.500	75%	9.153.650	75%	10.069.015	75%	11.075.916	100%	53.229.481	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan Sebanyak 11 Jenis																				
								Outcome : Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor																				
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp/tahun	100%	62.716.000	75%	134.889.010	75%	148.377.911	75%	163.215.702	75%	179.537.272	75%	197.490.999	100%	886.226.894	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah ATK yang Tersedia Terbayarnya Bahan Logistik Kantor Sebanyak 35 Jenis																				
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Outcome : Tersedianya ATK Bahan Logistik Kantor																				
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp/tahun	100%	20.300.000	75%	30.000.000	75%	33.000.000	75%	36.300.000	75%	39.930.000	75%	43.923.000	100%	203.453.000	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah Dokumen yang di Cetak 20000 Lembar dan Jumlah Dokumen yang di Gandakan Sebanyak 30 eks																				
								Outcome : Tersedianya Dokumen yang di Cetak dan Penggandaan																				
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp/tahun	100%	3.600.000	75%	3.600.000	75%	3.960.000	75%	4.356.000	75%	4.791.600	75%	5.270.760	100%	25.578.360	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah Surat Kabar yang disediakan 12 Eks																				
								Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan																				
								Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp/tahun	100%	19.500.000	0%	-	75%	23.595.000	75%	25.954.500	75%	28.549.950	75%	31.404.945	100%	129.004.395	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah Makan Minum Rapat 325 Kotak																				
								Outcome : Tersedianya Makan Minum Rapat																				
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp/tahun	100%	302.000.000	75%	279.900.000	75%	307.890.000	75%	338.679.000	75%	372.546.900	75%	409.801.590	100%	2.010.817.490	√			DPPKB	Luar daerah
								Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dikuti sebanyak 14 Perjalanan																				
								Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah																				
	Terlaksananya Kegiatan Oprasional Perkantoran	2	14	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp/tahun	100%	3.996.000	75%	7.200.000	75%	7.920.000	75%	8.712.000	75%	9.583.200	75%	10.541.520	100%	47.952.720	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah Materai yang disediakan 333 Lembar dan Jumlah Surat yang Terkirim 300 Surat																				
								Outcome : Tersedianya Jasa surat Menyurat																				
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp/tahun	100%	117.235.500	75%	15.000.000	75%	16.500.000	75%	18.150.000	75%	19.965.000	75%	21.961.500	100%	208.812.000	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah Listrik yang disediakan 7767 kwh dan Jumlah Sumber Daya Air yang disediakan sebanyak 183 Galon																				
								Outcome : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp/tahun	0%	-	75%	702.000.000	75%	772.200.000	75%	849.420.000	75%	934.362.000	75%	1.027.798.200	100%	4.285.780.200	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan honornya Sebanyak 25 Orang																				
								Outcome : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
	Terciptanya Kenyamanan dalam Pelaksanaan Tugas	2	14	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp/tahun	93%	130.350.000	75%	36.500.000	75%	40.150.000	75%	44.165.000	75%	48.581.500	75%	53.439.650	100%	353.186.150	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah BBM yang Tersedia 400 Liter Jumlah Kendaraan Dinas yang diperbaiki 11 Unit dan Jumlah Pajak Kendaraan yang dibayar 11 Unit																				
								Outcome : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp/tahun	100%	21.500.000	75%	29.000.000	75%	31.900.000	75%	35.090.000	75%	38.599.000	75%	42.458.900	100%	198.547.900	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah Computer yang diperbaiki 5 Unit, Jumlah Laptop yang diperbaiki 6 Unit, dan Jumlah Printer yang diperbaiki 5 Unit																				
								Outcome : Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin																				
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp/tahun	100%	7.500.000	0%	-	75%	8.250.000	75%	9.075.000	75%	9.982.500	75%	10.980.750	100%	45.788.250	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah AC yang diperbaiki 5 Unit																				
								Outcome : Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
								Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Rp/tahun	0%	-	75%	14.000.000	75%	15.400.000	75%	16.940.000	75%	18.634.000	75%	20.497.400	100%	85.471.400	√			DPPKB	Tanah Merah
								Output : Jumlah Kendaraan Dinas Mobil Jabatan Terpeliharanya kendaraan Dinas Mobil Jabatan 1 Unit																				
								Outcome : Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan Terpeliharanya kendaraan Dinas Mobil Jabatan																				
											4.325.884.026		**5.078.854.391**		**5.623.644.830**		**6.186.009.312**		**6.804.610.242**		**7.485.071.264**		**35.504.074.065**					

Tanah Merah, 2022
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

dr. VIVIANA MAHARANI PRADOTOKOESOEMO, MM
NIP. 19640917 199503 2 001

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING						URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN 2021	2021		2022		2023		2024		2025		SUMBER DANA				UNIT KERJA PERTANGGUNG JAWABAN	LOKASI
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	DAU	DAK	OTSUS	DBH		
									PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA														
Bertambahnya dan Meningkatnya jumlah Program KKBPK	Stakeholder dan Mitra Kerja KB	2	14	3	2	1	1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	23,00	23,00	Rp 196.579.000,00	22,80	Rp 4.375.000,00	22,60	Rp 4.812.500,00	22,40	Rp 5.293.750,00	22,20	Rp 5.823.125,00	-	-	-	DBH	DPPKB	TM
									output : Jumlah program Advokasi Program KKBPK 255 Orang																	
									outcome : Bertambahnya dan Meningkatnya Program Advokasi KKBPK																	
Meningkatnya Pengetahuan PUS tentang Program KKBPK	PUS, Bidan dan Kader KB	2	14	3	2	1	2		Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	5,00	5,00	Rp -	4,00	Rp 25.000.000,00	3,00	Rp 27.500.000,00	2,00	Rp 30.250.000,00	1,00	Rp 33.275.000,00	-	BOKB	-	-	DPPKB	TM
									Output : Jumlah PUS,Bidan dan Kader KB yang mengikuti Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK 200 orang																	
									Outcome : Bertambahnya dan Meningkatnya Pengetahuan PUS tentang (KIE) Program KKBPK																	
Meningkatnya Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	Balai KB	2	14	3	2	1	3		Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	76,00	76,00	Rp 107.254.000,00	78,00	Rp 117.979.400,00	80,00	Rp 129.777.340,00	82,00	Rp 142.755.074,00	84,00	Rp 157.030.581,40	-	BOKB	-	-	DPPKB	TM
									Outcput : Jumlah Balai yang menerima Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK 6 Balai																	
									Outcome : Meningkatnya Balai yang menerima Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK																	
Meningkatnya Promosi dan KIE melalui Media Massa	Masyarakat	2	14	3	2	1	4		Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	3,00	3,00	Rp -	2,00	Rp 70.640.000,00	1,00	Rp 77.704.000,00	1,00	Rp 85.474.400,00	1,00	Rp 94.021.840,00	-	BOKB	-	-	DPPKB	TM
									Output : Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa cetak dan elektronik serta media luar dengan cetak 22 buah yang terdiri dari Leaflet 64 Lembar dan cetak poster 305 Lembar																	
									Outcome : Meningkatnya Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa cetak dan elektronik serta media luar ruang																	
Meningkatnya Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini lokakarya (Minilok)	Kecamatan, Desa dan Minilok	2	14	3	2	1	7		Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini lokakarya (Minilok)	23,00	23,00	Rp -	22,80	Rp 312.000.000,00	22,60	Rp 343.200.000,00	22,40	Rp 377.520.000,00	22,20	Rp 415.272.000,00	-	BOKB	-	-	DPPKB	TM
									Output : Jumlah rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini lokakarya (Minilok) masing -masing 2 kali																	
									Outcome : Meningkatnya rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini lokakarya (Minilok)																	
Meningkat Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Balai Penyuluhan	2	14	3	2	1	8		Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK.	3,00	3,00	Rp 385.320.000,00	2,00	Rp 202.500.000,00	1,00	Rp 222.750.000,00	1,00	Rp 245.025.000,00	1,00	Rp 269.527.500,00	-	BOKB	-	-	DPPKB	TM
									Output : Jumlah Sarana Balai Penyuluhan KKBPK yaitu 6 balai																	
									Outcome : Meningkatnya Sarana Balai Penyuluhan KKBPK																	
Meningkatnya Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	2	14	3	2	2	4		Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	31,00	31,00	Rp 392.000.000,00	30,70	Rp 537.600.000,00	30,40	Rp 591.360.000,00	30,10	Rp 650.496.000,00	29,80	Rp 715.545.600,00	-	BOKB	-	-	DPPKB	TM
									Output: Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan yaitu 112 kampung																	
									Outcome : Meningkatnya Kader Institusi Masyarakat Pedesaan																	
Meningkatnya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Fasilitas Kesehatan	2	14	3	2	3	1		Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	23,00	23,00	Rp 43.600.000,00	22,80	Rp 10.350.000,00	22,60	Rp 11.385.000,00	22,40	Rp 12.523.500,00	22,20	Rp 13.775.850,00	-	BOKB	-	-	DPPKB	TM
									Output: Jumlah tersedianya ALKON di Fasilitas Kesehatan yaitu 1 Faskes																	
									Outcome: Meningkatnya Persediaan ALKON di Fasilitas Kesehatan																	
Meningkatnya Penggunaan MKJP	PUS	2	14	3	2	3	3		Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).	1,40	1,40	Rp -	1,80	Rp 66.047.000,00	2,20	Rp 72.651.700,00	2,60	Rp 79.916.870,00	3,00	Rp 87.908.557,00	-	BOKB	-	-	DPPKB	TM
									Output: Jumlah Pengguna MKJP yaitu 140 PUS di 20 Distrik																	
									Outcome : Meningkatnya Penggunaan MKJP																	
Meningkatnya sarana Penunjang Pelayanan KB	Balai Penyuluhan	2	14	3	2	3	6		Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB.	76,00	76,00	Rp 79.200.000,00	78,00	Rp 87.120.000,00	80,00	Rp 95.832.000,00	82,00	Rp 105.415.200,00	84,00	Rp 115.956.720,00	DAU	-	-	-	DPPKB	TM
									Output:Jumlah Balai Penyuluhan dalam menunjang Pelayanan KB yaitu 6 Balai																	
									Outcome: Meningkatnya Balai Penyuluhan dalam menunjang Pelayanan KB																	
Meningkatnya Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Fasilitas Kesehatan dan Jejaring	2	14	3	2	3	8		Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	76,00	76,00	Rp 456.171.000,00	78,00	Rp 10.200.000,00	80,00	Rp 11.220.000,00	82,00	Rp 12.342.000,00	84,00	Rp 13.576.200,00	-	-	-	DBH	DPPKB	TM
									Output : Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Jejaringan yaitu 10 Orang																	
									Outcome : Meningkatnya Fasilitas Kesehatan dan Jejaringan																	
Meningkatnya Dukungan operasional pelayanan KB bergerak.	PUS	2	14	3	2	3	11		Dukungan operasional pelayanan KB bergerak.	1,40	1,40	Rp 303.524.818,00	1,80	Rp 333.877.299,80	2,20	Rp 367.265.029,78	2,60	Rp 403.991.532,76	3,00	Rp 444.390.686,03	-	BOKB	-	-	DPPKB	TM
									Output: Jumlah PUS yang ikut Pelayan KB bergerak yaitu 140 orang																	
									Outcome : Meningkatnya PUS yang ikut Pelayana KB bergerak																	
Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja	Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja	2	14	3	2	4	1		Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber - KB	23,00	23,00	Rp -	22,80	Rp 188.500.000,00	22,60	Rp 207.350.000,00	22,40	Rp 228.085.000,00	22,20	Rp 250.893.500,00	DAU	-	-	-	DPPKB	TM
									Output: Jumlah Organisasi keMasyarakatan dan Mitra Kerja dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber - KB Yaitu 125 orang																	
									Outcome: Meningkatnya Peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber - KB																	

Tanah Merah, 22 Maret 2022

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Boven Digoel

dr.Viviana Indrani Pradotokoesoemo
Pembina Utama Muda
Nip. 19640917 199503 2 001

Tujuan	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Sumber Dana			Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026										
											Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	DAU	DAK	DTSUS		
		2	14					**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan KB**	Terselenggaranya			**2.439.790.000**		**4.540.654.000**		**4.994.719.400**		**5.494.191.340**		**6.043.610.474**		**2.737.991.449**		**26.241.956.663**					
untuk Meningkatnya wawasan masyarakat mengenai survei/pendataan tentang pembangunan kependudukan	20 Kampung KB yang Mendapatkan Biaya Operasional KB	2	14	02	2	01	03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Pelaksaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Rp/tahun	96%	1.083.200.000	97%	1.188.220.000	98%	1.307.042.000	98%	1.437.746.200	99%	1.581.520.820				6.597.729.020		√		DPPKB	Tanah Merah
									-Output: Jumlah Kampung yang mendapatkan biaya operasional KB (20 Kampung)																					
									-Outcome: Meningkatnya wawasan masyarakat mengenai survei/pendataan tentang pembangunan kependudukan																					
untuk menigkatkan pengetahuan masyarakat tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di 6 Kampung	80 masyarakat yang mengikuti sosialisasi Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di 6 Kampung	2	14	02	2	01	02		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Rp/tahun			100%	1.200.000.000	98%	1.320.000.000	98%	1.452.000.000	99%	1.597.200.000	99%	1.756.920.000		7.326.120.000	√			DPPKB	Tanah Merah
									-Output : Jumlah Kampung yang mengikuti sosialisasi GDPK (6 Kampung)																					
									-Outcome: tersedianya Dokumen GDPK																					
Untuk Meningkatkan Pelaksanan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Kependudukan	9 orang PLKB yang Melaksanan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Kependudukan	2	14	02	2	01	04		Pelaksanan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Kependudukan	Rp/tahun			100%	258.200.000	98%	284.020.000	98%	312.422.000	99%	343.664.200	99%	378.030.620		1.576.336.820	√			DPPKB	Tanah Merah
									-Output : Jumlah Dokumen tentang Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Kependudukan (1 Dokumen)																					
									-Outcome: tersedianya 1 Dokumen																					
Meningkatkan Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Melaksanakan Pendataan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain di 11 Kampung	2	14	02	2	02	08		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Rp/tahun	100%	164.390.000	100%	180.829.000	100%	198.911.900	100%	218.803.090	100%	240.683.399				1.003.617.389	√			DPPKB	Tanah Merah
									-Output : Pendataan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain di 11 Kampung																					
									-Outcome : Tersedianya data penunjang Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain di 11 Kampung																					
Untuk Meningkatkan kualitas Pengolahan Data Kependudukan di Balai Kampung	Penyediaan Media Cetak untuk Pengolahan Data Kependudukan di Balai Kampung (4 Balai)	2	14	02	2	02	02		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Rp/tahun			100%	84.000.000	100%	92.400.000	100%	101.640.000	100%	111.804.000	100%	122.984.400		512.828.400	√			DPPKB	Tanah Merah
									-Output : Pengadaan Media Cetak di Balai Kampung (4 Balai)																					
									-Outcome : Tersedianya Media Cetak pada Balai Kampung (4 Balai) untuk Pengolahan Data Kependudukan																					
Untuk Meningkatkan Kualitas Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di 4 Kampung	8 orang PLKB yang Melaksanan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di 4 kampung	2	14	02	2	02	03		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Rp/tahun			100%	326.800.000	100%	359.480.000	100%	395.428.000	100%	434.970.800	100%	478.467.880	100%	1.995.146.680	√			DPPKB	Tanah Merah
									-Output : Jumlah Dokumen tentang Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Kependudukan (1 Dokumen)																					
									-Outcome : tersedianya 1 Dokumen																					
Untuk Menyediakan data Informasi keluarga	Masyarakat yang Menyediakan data Informasi keluarga	2	14	02	2	02	11		Penyediaan data dan Informasi Keluarga	Rp/tahun			100%	1.085.000	100%	1.193.500	100%	1.312.850	100%	1.444.135	100%	1.588.549	100%	6.624.034		√		DPPKB	Tanah Merah
									-Output : menyediakan data informasi keluarga																					
									-Outcome : meningkatnya jumlah penyediaan data dan informasi keluarga																					
Untuk meningkatkan Pengetahuan Kader PPKBD dalam Melaksanakan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB di 112 Kampung	kader PPKBD yang melaksanakan Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB di 112 Kampung	2	14	02	2	02	13		Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp/tahun	98%	537.600.000	99%	591.360.000	97%	650.496.000	97%	715.545.600	97%	787.100.160			100%	3.282.101.760		√		DPPKB	Tanah Merah
									-Output : Jumlah kampung yang mendapatkan biaya pembinaan program (112 Kampung)																					
									-Outcome : Telah Melaksanakan pengolahan dan Pelaporan data di 112 Kampung																					
untuk meningkatkan wawasan kader Kampung KB Tentang Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal.	kader Kampung KB yang mendapatkan penyuluhan Tentang Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal. (100 orang kader KB)	2	14	02	2	01	05		Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal.		99%	210.000.000	100%	231.000.000	100%	254.100.000	100%	279.510.000	100%	307.461.000				1.282.071.000	√			DPPKB	Tanah Merah
									-Output : jumlah kader Kampung KB yang mendapatkan penyuluhan tentang Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal. (100 orang kader KB)																					
									-Outcome: meningkatnya Wawasan kader Kampung KB yang mendapatkan penyuluhan tentang Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal.(100 orang kader KB)																					
Untuk Menigkatkan Pelaksanaan Survei/ Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Kependudukan	15 orang Honor PLKB yang telah Melaksanaan Survei/ Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Kependudukan	2	14	02	2	01	04		Pelaksanaan Survei/ Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Kependudukan		100%	435.600.000	95%	479.160.000	96%	527.076.000	97%	579.783.600	98%	637.761.960				2.659.381.560	√			DPPKB	Tanah Merah
									-Output : Honor PLKB yang telah Melaksanaan Survei/ Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Kependudukan																					
									-Outcome: telah Melaksanaan Survei/ Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Kependudukan																					
												1.785.190.000		**3.830.494.000**		**4.213.543.400**		**4.634.897.740**		**5.098.387.514**		**2.737.991.449**		**22.300.504.103**					

Tanah Merah, 2022
Dinas Pengendalian Penduduk & KB
Kabupaten Boven Digoel

dr. VIVIANA MAHARANI PRADOTOKOESOEMO, MM
NIP. 19640917 199503 2 001

TUJUAN	SASARAN	KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
											Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Sumber Dana					
											Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	DAU	DAK	OTSUS		
		2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1.808.056.000		927.307.000		2.871.399.300		3.158.539.230		3.474.393.153		3.821.831.467		16.061.526.150					
								Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																					
Bertambah dan Meningkatnya Jumlah dan Pengetahuan Kelompok (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kelompok (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	2	14	04	2	01	01	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera** "Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga"	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Rp/tahun	44%	197.729.000			75%	217.501.900	75%	239.252.090	75%	263.177.299	75%	289.495.028	100%	1.207.155.317	√			DPPKB	Tanah Merah
									-Output Jumlah Anggota Kelompok yang dibentuk dan dibina 200 orang																					
									-Outcome bertambah dan meningkatnya anggota kelompok yang dibentuk dan dibina																					
Menurunkan Kasus stunting lewat Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	14	04	2	01	02		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp/tahun	100%	125.000.000	100%	120.000.000	75%	132.000.000	75%	145.200.000	75%	159.720.000	75%	175.692.000	100%	857.612.000		√		DPPKB	Tanah Merah
									-Output Pengadaan BKB KIT Stunting sebanyak 2 Set																					
									-Outcome Menurunya Kasus Stunting																					
Meningkatkan Pengetahuan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	14	04	2	01	03		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp/tahun	100%	58.800.000			75%	64.680.000	75%	71.148.000	75%	78.262.800	75%	86.089.080	100%	358.979.880	√			DPPKB	Tanah Merah
									-Output Jumlah Tenaga Kontrak Bidang KS yang Dibayarkan Honornya sebanyak 2 orang																					
									-Outcome Meningkatnya Pengetahuan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																					
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	14	04	2	01	04		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp/tahun	99%	653.445.000			75%	718.789.500	75%	790.668.450	75%	869.735.295	75%	956.708.824	100%	3.989.347.069	√			DPPKB	Tanah Merah
									-Output Jumlah Akseptor KB yang dilatih 90 Orang, Jumlah Kelompok UPPKS yang dibina 200 orang dan jumlah Pengelola BKB Posyandu yang dilatih 100 orang																					
									-Outcome Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																					
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Stunting lewat Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Masyarakat (Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS))	2	14	04	2	01	07		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemeberdayaan Ekonomi	Rp/tahun	99%	641.000.000			75%	705.100.000	75%	775.610.000	75%	853.171.000	75%	938.488.100	100%	3.913.369.100		√		DPPKB	Tanah Merah
									-Output Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan stunting sebanyak 300 orang																					
									-Outcome Meningkatnya Pengetahuan Peserta tentang Stunting																					
Meningkatnya Pemahaman Peserta terhadap bahaya Narkoba PMS dan HIV/AIDS dikalangan Remaja melalui Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Remaja (Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Generasi Berencana)	2	14	04	2	01	08		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan	Rp/tahun	100%	132.082.000			75%	145.290.200	75%	159.819.220	75%	175.801.142	75%	193.380.256	100%	806.372.818	√			DPPKB	Tanah Merah
									-Output Jumlah Peserta Penyuluhan Penanggulangan Narkoba PMS HIV/AIDS																					
									-Outcome Meningkatnya Pemahaman Peserta terhadap bahaya Narkoba PMS dan HIV/AIDS dikalangan Remaja																					
Menurunkan Angka Stunting lewat Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	14	04	2	01	05		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp/tahun			75%	618.920.000	75%	680.812.000	75%	748.893.200	75%	823.782.520	75%	906.160.772	100%	3.778.568.492		√		DPPKB	Tanah Merah
									-Output Jumlah Calon Pengantin, calon PUS,Ibu Hamil Ibu Paca Bersalin didampingi sebanyak 30 Orang																					
									-Outcome Menurunya Angka Stunting																					
Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Peserta IPK lewat Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Masyarakat	2	14	04	2	01	10		Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Rp/tahun			75%	188.387.000	75%	207.225.700	75%	227.948.270	75%	250.743.097	75%	275.817.407	100%	1.150.121.474	√			DPPKB	Tanah Merah
									-Output Jumlah Peserta yang Mengikuti sebanyak 540 Orang																					
									-Output Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Peserta Tentang IPK																					
												1.808.056.000		927.307.000		2.871.399.300		3.158.539.230		3.474.393.153		3.821.831.467		16.061.526.150					

Tanah Merah, 2022
Dinas Pengendalian Penduduk & KB
Kabupaten Boven Digoel

dr. VIVIANA MAHARANI PRADOTOKOESOEMO, MM
NIP. 19640917 199503 2 001

Tabel 6.1.2

Indikator kinerja Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Target
1	JLH. KERJASAMA PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIK. KEPENDUDUKAN	5 kali kerjasama / 442 Kali (penyiaran)
2	ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI/CPR BAGI PEREMPUAN MENIKAH (CPR)	7007 KB PA/ 11.512 Jlh PUS
3	RATA RATA JUMLAH ANAK DALAM KELUARGA	7076 Jmlh Anak / 4414 Jlh Keluarga
4	CAKUPAN PUS YANG INGIN BER-KB TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED)	4505 Jlh PUS yg Tdk terlayani/ 11.512 Jlh PUS
5	CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTRINYA DI BAWAH 20 TAHUN	3454 Jlh PUS dg istri < 20 th/11.512 Jlh PUS
6	CAKUPAN KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI ALKON DI GUDANG KABUPATEN	39.952 Jlh persediaan Alkon di Kab/ 585 Rata rata pemakaian per-bulan
7	CAKUPAN KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI ALKON DI FASKES	2340 Jlh persediaan Alkon di Faskes / 145 rata rata pemakaian per-bulan
8	PRESENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	226 jlh Akseptor KB yg Menggunakan MKJP/7007 jlh Akseptor KB
9	JUMLAH KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG MELAKUKAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN	3 kali penlat kerjasama dgn P2KS (90 bidan)
10	CAKUPAN KELUARGA YANG MEMPUNYAI BALITA DAN ANAK YANG MEMAHAMI DAN MELAKSANAKAN PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	650 kelg.yg mempnyi Balita - Anak /4414 Jlh keluarga yg mempnyai Balita-Anak

11	PRESENTASE TINGKAT KEBERLANGSUNGAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI	4505 jlh PUS yg Tidak lagi Menggunakan Kontrasepsi/7007 Akseptor KB
12	PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS) DI SETIAP KECAMATAN	6 PPKS/ 20 Distrik
13	RATA RATA USIA KAWIN PERTAMA WANITA	250 WUS /11.512 Jlh PUS
14	CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR PESERTA KB ANGGOTA UPPKS YANG BERKB MANDIRI	249 anggota kel UPPKS ber KB mandiri / 3.984 total kesel. UPPKS
15	CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA REMAJA / BKR YANG BER-KB	1050 Anggta BKR yang ber KB (9 distrik) /5190 Jlh kelmpk BKR
16	CAKUPAN REMAJA DALAM PUSAT INFORMASI KONSELING	56 Genre Kit (9 dist)/20 Distrik
17	PERSENTASE REMAJA YANG TERKENA IMS	1150 Remaja yang di suluh/5190 Jlh Remaja
18	CAKUPAN KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA	60 Klpk BKB/379 Jlh Klpk
19	CAKUPAN ANGGOTA BKB (BINA KELUARGA BALITA) YANG BER-KB	150 Anggta BKB yang ber KB (3 distrik) /379 Jlh kelmpk BKB
20	CAKUPAN KELUARGA YANG MEMPUNYAI BALITA DAN ANAK YANG MEMAHAMI DAM MELAKSANAKAN PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	300 Keluarga/4414 Jlh Kelga yg punya balita/anak
21	CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA LANSIA BER-KB	250 Anggta BKL yang ber KB (3 distrik) /2125 Jlh kelmpk BKL
22	PERSENTASE SEKTOR YANG TERSOSIALISASI KONSEP PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN & ALAT UKURNYA (IPBK/INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN	17 OPD yg terpapar / dari 53 OPD
23	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (DINAS / BADAN) YANG BERPERAN AKTIF DALAM	18 OPD yg berperan Aktif di

	PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI KAMPUNG KB	Kamp KB / 53 jmlh OPD yg ada
24	ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI/ CPR BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15 – 49	7007 Jmlh PA / 11.512 Jmlh PUS
25	PERSENTASE PEMBIAYAAN PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI APBD DAN APBDes	3.648.813.000 Jmlh Anggaran Bid Dalduk/ 9.922.611.750 Jmlh Apbd Dppkb
26	CAKUPAN PKB / PLKB YANG DI DAYAGUNAKAN PERANGKAT DAERAH KB UNTUK PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK	20 Jmlh PLKB, PKB / 112 kampung (20 dist)
27	CAKUPAN PENYEDIAAN INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DI SETIAP DESA	500 Jmlh KK (2 dist) / 40.000 Jmlh KK Kab
28	RASIO PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KB DESA (PPKBD) SETIAP DESA/ KELURAHAN	20 PPKBD / 112 kampung
29	Jlh. Surat keluar/ meterai yang di sediakan	100%
30	Jlh. Bahan komunikasi, air dan KWH Listrik	100%
31	Jlh. STNK/BPKB terbayar/terawatt	100%
32	Jlh. Honorarium Tenaga Honorer PLKB dan Operator Keuangan	100%
33	Jlh. Ruangan dibersihkan	100%
34	Jlh. Peralatan kerja kantor yang di perbaiki	100%
35	Jlh. Alat tulis kantor yang tersedia	100%
36	Jlh. Jenis ATK dan penggandaan yang di cetak	100%

Tabel 6.1.2

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas PPKB Kabupaten Boven Digoel

Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 – 49 tahun);	17 anak per 1000 perempuan usia 15 – 49 th	17 anak per 1000 perempuan usia 15 – 49 th	10 anak per 1000 perempuan usia 15 – 49 th	10 anak per 1000 perempuan usia 15 – 49 th	10 anak per 1000 perempuan usia 15 – 49 th	10 anak per 1000 perempuan usia 15 – 49 th
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR);	52,32%	63,19%	41,04%	53,38%	51,23%	51,23%
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);	0 %	0 %	19,32 %	0 %	0 %	0 %
4	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun);	90 bayi per 1000 perempuan usia 15 – 19 th	90 bayi per 1000 perempuan usia 15 – 19 th	117 bayi per 1000 perempuan usia 15 – 19 th	115 bayi per 1000 perempuan usia 15 – 19 th	61 bayi per 1000 perempuan usia 15 – 19 th	61 bayi per 1000 perempuan usia 15 – 19 th
5	Menurunnya kehamilan yang tidak di inginkan dari WUS (15 – 19 tahun);	1,36 %	0,58 %	0,62 %	0,52 %	0,50 %	0,49 %
6	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan MKJP.	10,43 %	3,22 %	7,54 %	4,12 %	4,12 %	4,12 %

Sumber data : bidang KB - DPPKB Th 2021

Tabel 6.1.3

Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Boven Digoel yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2027
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	**JLH. KERJASAMA PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIK. KEPENDUDUKAN**	5 kali kerjasama / 442 Kali (penyiaran)	5 kali kerjasama / 442 Kali (penyiaran)	5 kali kerjasama / 442 Kali (penyiaran)	5 kali kerjasama / 442 Kali (penyiaran)	5 kali kerjasama / 442 Kali (penyiaran)	5 kali kerjasama / 442 Kali (penyiaran)	5 kali kerjasama / 442 Kali (penyiaran)
2	**ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI/CPR BAGI PEREMPUAN MENIKAH (CPR)**	7007 KB PA/ 11.512 Jlh PUS	7007 KB PA/ 11.512 Jlh PUS	7007 KB PA/ 11.512 Jlh PUS	7007 KB PA/ 11.512 Jlh PUS	7007 KB PA/ 11.512 Jlh PUS	7007 KB PA/ 11.512 Jlh PUS	7007 KB PA/ 11.512 Jlh PUS
3	**RATA RATA JUMLAH ANAK DALAM KELUARGA**	7076 Jmlh Anak / 4414 Jlh Keluarga	7076 Jmlh Anak / 4414 Jlh Keluarga	7076 Jmlh Anak / 4414 Jlh Keluarga	7076 Jmlh Anak / 4414 Jlh Keluarga	7076 Jmlh Anak / 4414 Jlh Keluarga	7076 Jmlh Anak / 4414 Jlh Keluarga	7076 Jmlh Anak / 4414 Jlh Keluarga
4	**CAKUPAN PUS YANG INGIN BER-KB TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED)**	4505 Jlh PUS yg Tdk terlayani/ 11.512 Jlh PUS	4505 Jlh PUS yg Tdk terlayani/ 11.512 Jlh PUS	4505 Jlh PUS yg Tdk terlayani/ 11.512 Jlh PUS	4505 Jlh PUS yg Tdk terlayani/ 11.512 Jlh PUS	4505 Jlh PUS yg Tdk terlayani/ 11.512 Jlh PUS	4505 Jlh PUS yg Tdk terlayani/ 11.512 Jlh PUS	4505 Jlh PUS yg Tdk terlayani/ 11.512 Jlh PUS
5	**CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTRINYA DI BAWAH 20 TAHUN**	3454 Jlh PUS dg istri < 20 th/11.512 Jlh PUS	3454 Jlh PUS dg istri < 20 th/11.512 Jlh PUS	3454 Jlh PUS dg istri < 20 th/11.512 Jlh PUS	3454 Jlh PUS dg istri < 20 th/11.512 Jlh PUS	3454 Jlh PUS dg istri < 20 th/11.512 Jlh PUS	3454 Jlh PUS dg istri < 20 th/11.512 Jlh PUS	3454 Jlh PUS dg istri < 20 th/11.512 Jlh PUS
6	**CAKUPAN KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI ALKON DI GUDANG KABUPATEN**	39.952 Jlh persediaan Alkon di Kab/ 585 Rata rata pemakaian per-bulan	39.952 Jlh persediaan Alkon di Kab/ 585 Rata rata pemakaian	39.952 Jlh persediaan Alkon di Kab/ 585 Rata rata pemakaian	39.952 Jlh persediaan Alkon di Kab/ 585 Rata rata pemakaian	39.952 Jlh persediaan Alkon di Kab/ 585 Rata rata pemakaian	39.952 Jlh persediaan Alkon di Kab/ 585 Rata rata pemakaian	39.952 Jlh persediaan Alkon di Kab/ 585 Rata rata pemakaian per-bulan

			per-bulan	per-bulan	per-bulan	per-bulan	per-bulan	
7	**CAKUPAN KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI ALKON DI FASKES**	2340 Jlh persediaan Alkon di Faskes / 145 rata rata pemakaian per-bulan	2340 Jlh persediaan Alkon di Faskes / 145 rata rata pemakaian per-bulan	2340 Jlh persediaan Alkon di Faskes / 145 rata rata pemakaian per-bulan	2340 Jlh persediaan Alkon di Faskes / 145 rata rata pemakaian per-bulan	2340 Jlh persediaan Alkon di Faskes / 145 rata rata pemakaian per-bulan	2340 Jlh persediaan Alkon di Faskes / 145 rata rata pemakaian per-bulan	2340 Jlh persediaan Alkon di Faskes / 145 rata rata pemakaian per-bulan
8	**PRESENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)**	226 jlh Akseptor KB yg Menggunakan MKJP/7007 jlh Akseptor KB	226 jlh Akseptor KB yg Menggunakan MKJP/7007 jlh Akseptor KB	226 jlh Akseptor KB yg Menggunakan MKJP/7007 jlh Akseptor KB	226 jlh Akseptor KB yg Menggunakan MKJP/7007 jlh Akseptor KB	226 jlh Akseptor KB yg Menggunakan MKJP/7007 jlh Akseptor KB	226 jlh Akseptor KB yg Menggunakan MKJP/7007 jlh Akseptor KB	226 jlh Akseptor KB yg Menggunakan MKJP/7007 jlh Akseptor KB
9	**JUMLAH KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG MELAKUKAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN**	3 kali penlat kerjasama dgn P2KS (90 bidan)	3 kali penlat kerjasama dgn P2KS (90 bidan)	3 kali penlat kerjasama dgn P2KS (90 bidan)	3 kali penlat kerjasama dgn P2KS (90 bidan)	3 kali penlat kerjasama dgn P2KS (90 bidan)	3 kali penlat kerjasama dgn P2KS (90 bidan)	3 kali penlat kerjasama dgn P2KS (90 bidan)
10	**CAKUPAN KELUARGA YANG MEMPUNYAI BALITA DAN ANAK YANG MEMAHAMI DAN MELAKSANAKAN PENGASUHAN DAN**	650 kelg.yg mempnyi Balita - Anak /4414 Jlh keluarga yg mempnyai Balita-Anak	650 kelg.yg mempnyi Balita - Anak /4414 Jlh keluarga yg mempnyai	650 kelg.yg mempnyi Balita - Anak /4414 Jlh keluarga yg mempnyai	650 kelg.yg mempnyi Balita - Anak /4414 Jlh keluarga yg mempnyai	650 kelg.yg mempnyi Balita - Anak /4414 Jlh keluarga yg mempnyai	650 kelg.yg mempnyi Balita - Anak /4414 Jlh keluarga yg mempnyai	650 kelg.yg mempnyi Balita - Anak /4414 Jlh keluarga yg mempnyai Balita-Anak

	PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK		Balita-Anak	Balita-Anak	Balita-Anak	Balita-Anak	Balita-Anak	
11	**PRESENTASE TINGKAT KEBERLANGSUNGAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI**	4505 jlh PUS yg Tidak lagi Menggunakan Kontrasepsi/7007 Akseptor KB	4505 jlh PUS yg Tidak lagi Menggunakan Kontrasepsi /7007 Akseptor KB	4505 jlh PUS yg Tidak lagi Menggunakan Kontrasepsi /7007 Akseptor KB	4505 jlh PUS yg Tidak lagi Menggunakan Kontrasepsi /7007 Akseptor KB	4505 jlh PUS yg Tidak lagi Menggunakan Kontrasepsi /7007 Akseptor KB	4505 jlh PUS yg Tidak lagi Menggunakan Kontrasepsi /7007 Akseptor KB	4505 jlh PUS yg Tidak lagi Menggunakan Kontrasepsi/7007 Akseptor KB
12	**PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS) DI SETIAP KECAMATAN**	6 PPKS/ 20 Distrik	6 PPKS/ 20 Distrik	6 PPKS/ 20 Distrik	6 PPKS/ 20 Distrik	6 PPKS/ 20 Distrik	6 PPKS/ 20 Distrik	6 PPKS/ 20 Distrik
13	**RATA RATA USIA KAWIN PERTAMA WANITA**	250 WUS /11.512 Jlh PUS	250 WUS /11.512 Jlh PUS	250 WUS /11.512 Jlh PUS	250 WUS /11.512 Jlh PUS	250 WUS /11.512 Jlh PUS	250 WUS /11.512 Jlh PUS	250 WUS /11.512 Jlh PUS
14	**CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR PESERTA KB ANGGOTA UPPKS YANG BERKB MANDIRI**	249 anggota kel UPPKS ber KB mandiri / 3.984 total kesel. UPPKS	249 anggota kel UPPKS ber KB mandiri / 3.984 total kesel. UPPKS	249 anggota kel UPPKS ber KB mandiri / 3.984 total kesel. UPPKS	249 anggota kel UPPKS ber KB mandiri / 3.984 total kesel. UPPKS	249 anggota kel UPPKS ber KB mandiri / 3.984 total kesel. UPPKS	249 anggota kel UPPKS ber KB mandiri / 3.984 total kesel. UPPKS	249 anggota kel UPPKS ber KB mandiri / 3.984 total kesel. UPPKS
15	**CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA REMAJA / BKR YANG BER-KB**	1050 Anggta BKR yang ber KB (9 distrik) /5190 Jlh kelmpk BKR	1050 Anggta BKR yang ber KB (9 distrik) /5190 Jlh kelmpk BKR	1050 Anggta BKR yang ber KB (9 distrik) /5190 Jlh kelmpk BKR	1050 Anggta BKR yang ber KB (9 distrik) /5190 Jlh kelmpk BKR	1050 Anggta BKR yang ber KB (9 distrik) /5190 Jlh kelmpk BKR	1050 Anggta BKR yang ber KB (9 distrik) /5190 Jlh kelmpk BKR	1050 Anggta BKR yang ber KB (9 distrik) /5190 Jlh kelmpk BKR

16	**CAKUPAN REMAJA DALAM PUSAT INFORMASI KONSELING**	56 Genre Kit (9 dist)/20 Distrik	56 Genre Kit (9 dist)/20 Distrik	56 Genre Kit (9 dist)/20 Distrik	56 Genre Kit (9 dist)/20 Distrik	56 Genre Kit (9 dist)/20 Distrik	56 Genre Kit (9 dist)/20 Distrik	56 Genre Kit (9 dist)/20 Distrik
17	**PERSENTASE REMAJA YANG TERKENA IMS**	1150 Remaja yang di suluh/5190 Jlh Remaja	1150 Remaja yang di suluh/5190 Jlh Remaja	1150 Remaja yang di suluh/5190 Jlh Remaja	1150 Remaja yang di suluh/5190 Jlh Remaja	1150 Remaja yang di suluh/5190 Jlh Remaja	1150 Remaja yang di suluh/5190 Jlh Remaja	1150 Remaja yang di suluh/5190 Jlh Remaja
18	**CAKUPAN KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA**	60 Klpk BKB/379 Jlh Klpk	60 Klpk BKB/379 Jlh Klpk	60 Klpk BKB/379 Jlh Klpk	60 Klpk BKB/379 Jlh Klpk	60 Klpk BKB/379 Jlh Klpk	60 Klpk BKB/379 Jlh Klpk	60 Klpk BKB/379 Jlh Klpk
19	**CAKUPAN ANGGOTA BKB (BINA KELUARGA BALITA) YANG BER-KB**	150 Anggta BKB yang ber KB (3 distrik) /379 Jlh kelmpk BKB	150 Anggta BKB yang ber KB (3 distrik) /379 Jlh kelmpk BKB	150 Anggta BKB yang ber KB (3 distrik) /379 Jlh kelmpk BKB	150 Anggta BKB yang ber KB (3 distrik) /379 Jlh kelmpk BKB	150 Anggta BKB yang ber KB (3 distrik) /379 Jlh kelmpk BKB	150 Anggta BKB yang ber KB (3 distrik) /379 Jlh kelmpk BKB	150 Anggta BKB yang ber KB (3 distrik) /379 Jlh kelmpk BKB
20	**CAKUPAN KELUARGA YANG MEMPUNYAI BALITA DAN ANAK YANG MEMAHAMI DAM MELAKSANAKAN PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK**	300 Keluarga/4414 Jlh Kelga yg punya balita/anak	300 Keluarga/4414 Jlh Kelga yg punya balita/anak	300 Keluarga/4414 Jlh Kelga yg punya balita/anak	300 Keluarga/4414 Jlh Kelga yg punya balita/anak	300 Keluarga/4414 Jlh Kelga yg punya balita/anak	300 Keluarga/4414 Jlh Kelga yg punya balita/anak	300 Keluarga/4414 Jlh Kelga yg punya balita/anak

21	**CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA LANSIA BER-KB**	250 Anggta BKL yang ber KB (3 distrik) /2125 Jlh kelmpk BKL	250 Anggta BKL yang ber KB (3 distrik) /2125 Jlh kelmpk BKL	250 Anggta BKL yang ber KB (3 distrik) /2125 Jlh kelmpk BKL	250 Anggta BKL yang ber KB (3 distrik) /2125 Jlh kelmpk BKL	250 Anggta BKL yang ber KB (3 distrik) /2125 Jlh kelmpk BKL	250 Anggta BKL yang ber KB (3 distrik) /2125 Jlh kelmpk BKL	250 Anggta BKL yang ber KB (3 distrik) /2125 Jlh kelmpk BKL
22	**PERSENTASE SEKTOR YANG TERSOSIALISASI KONSEP PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN & ALAT UKURNYA (IPBK/INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN**	17 OPD yg terpapar / dari 53 OPD	17 OPD yg terpapar / dari 53 OPD	17 OPD yg terpapar / dari 53 OPD	17 OPD yg terpapar / dari 53 OPD	17 OPD yg terpapar / dari 53 OPD	17 OPD yg terpapar / dari 53 OPD	17 OPD yg terpapar / dari 53 OPD
23	**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (DINAS / BADAN) YANG BERPERAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI KAMPUNG KB**	18 OPD yg berperan Aktif di Kamp KB / 53 jmlh OPD yg ada	18 OPD yg berperan Aktif di Kamp KB / 53 jmlh OPD yg ada	18 OPD yg berperan Aktif di Kamp KB / 53 jmlh OPD yg ada	18 OPD yg berperan Aktif di Kamp KB / 53 jmlh OPD yg ada	18 OPD yg berperan Aktif di Kamp KB / 53 jmlh OPD yg ada	18 OPD yg berperan Aktif di Kamp KB / 53 jmlh OPD yg ada	18 OPD yg berperan Aktif di Kamp KB / 53 jmlh OPD yg ada
24	**ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI/ CPR BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15 – 49**	7007 Jmlh PA / 11.512 Jmlh PUS	7007 Jmlh PA / 11.512 Jmlh PUS	7007 Jmlh PA / 11.512 Jmlh PUS	7007 Jmlh PA / 11.512 Jmlh PUS	7007 Jmlh PA / 11.512 Jmlh PUS	7007 Jmlh PA / 11.512 Jmlh PUS	7007 Jmlh PA / 11.512 Jmlh PUS

25	**PERSENTASE PEMBIAYAAN PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI APBD DAN APBDes**	3.648.813.000 Jmlh Anggaran Bid Dalduk/ 9.922.611.750 Jmlh Apbd Dppkb	3.648.813.000 Jmlh Anggaran Bid Dalduk/ 9.922.611.750 Jmlh Apbd Dppkb	3.648.813.000 Jmlh Anggaran Bid Dalduk/ 9.922.611.750 Jmlh Apbd Dppkb	3.648.813.000 Jmlh Anggaran Bid Dalduk/ 9.922.611.750 Jmlh Apbd Dppkb	3.648.813.000 Jmlh Anggaran Bid Dalduk/ 9.922.611.750 Jmlh Apbd Dppkb	3.648.813.000 Jmlh Anggaran Bid Dalduk/ 9.922.611.750 Jmlh Apbd Dppkb	3.648.813.000 Jmlh Anggaran Bid Dalduk/ 9.922.611.750 Jmlh Apbd Dppkb
26	**CAKUPAN PKB / PLKB YANG DI DAYAGUNAKAN PERANGKAT DAERAH KB UNTUK PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK**	20 Jmlh PLKB, PKB / 112 kampung (20 dist)	20 Jmlh PLKB, PKB / 112 kampung (20 dist)	20 Jmlh PLKB, PKB / 112 kampung (20 dist)	20 Jmlh PLKB, PKB / 112 kampung (20 dist)	20 Jmlh PLKB, PKB / 112 kampung (20 dist)	20 Jmlh PLKB, PKB / 112 kampung (20 dist)	20 Jmlh PLKB, PKB / 112 kampung (20 dist)
27	**CAKUPAN PENYEDIAAN INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DI SETIAP DESA**	500 Jmlh KK (2 dist) / 40.000 Jmlh KK Kab	500 Jmlh KK (2 dist) / 40.000 Jmlh KK Kab	500 Jmlh KK (2 dist) / 40.000 Jmlh KK Kab	500 Jmlh KK (2 dist) / 40.000 Jmlh KK Kab	500 Jmlh KK (2 dist) / 40.000 Jmlh KK Kab	500 Jmlh KK (2 dist) / 40.000 Jmlh KK Kab	500 Jmlh KK (2 dist) / 40.000 Jmlh KK Kab
28	**RASIO PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KB DESA (PPKBD) SETIAP DESA/ KELURAHAN**	20 PPKBD / 112 kampung	20 PPKBD / 112 kampung	20 PPKBD / 112 kampung	20 PPKBD / 112 kampung	20 PPKBD / 112 kampung	20 PPKBD / 112 kampung	20 PPKBD / 112 kampung
29	**Jlh. Surat keluar/ meterai yang di sediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

30	**Jlh. Bahan komunikasi, air dan KWH Listrik**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	**Jlh. STNK/BPKB terbayar/terawatt**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	**Jlh. Honorarium Tenaga Honorer PLKB dan Operator Keuangan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	**Jlh. Ruangan dibersihkan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	**Jlh. Peralatan kerja kantor yang di perbaiki**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	**Jlh. Alat tulis kantor yang tersedia**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	**Jlh. Jenis ATK dan penggandaan yang di cetak**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	**Jlh. Bahan logistic kantor yang disediakan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	**Jlh. Kotak Makanan dan minuman**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

39	**Jlh rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	**Jlh. Titik lampu**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	**Jlh.Buku Bacaan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	**Jlh beberapa jenis perlengkapan kantor**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	**Jlh. Jenis ATK dan Pengandaan yang di cetak**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
44	**Jlh.Gedung Kantor yang direhab**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	**Jlh pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	**Jlh.Pakaian Dinas Aparatur**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
47	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	fungsi keluarga							
48	**Jlh laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
49	**Jlh laporan keuangan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
50	**Jlh dokumen keuangan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
51	**Jlh dokumen renja RKA DPA SKPD**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
52	**Jlh dokumen Program SKPD**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel merupakan suatu perencanaan Strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada. Renstra Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana ini juga diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dalam hal pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga yang serta merta melibatkan Lintas Sektor / OPD lainnya di Kabupaten Boven Digoel.

7.1 Kesimpulan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana 2021-2025 Renstra ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel dalam menghadapi tantangan pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan R3QQEWasPembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA) di Kabupaten Boven Digoel yang begitu kompleks.

RENSTRA Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana ini merupakan dokumen perencanaan, Visi dan Misi yang telah di tetapkan dapat mengubah orientasi pelaksanaan program BANGGA KENCANA yang semula hanya menekankan

pada upaya pengendalian secara kuantitatif, namun secara bertahap di ubah menjadi upaya peningkatan kualitas SDM untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Secara umum dokumen Renstra ini adalah sebuah garis kebijaksanaan yang disusun sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan mengembangkan kreatifitas, inovasi dan kemampuan dalam berkolaborasi dengan mitra kerja terkait dalam pelaksanaan BANGGA KENCANA, secara teknis Renstra ini di jabarkan oleh DPPKB lebih lanjut dalam bentuk program program kerja, yang selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran DPPKB agar tercipta sinergi dalam pelaksanaannya .

Dalam upaya peningkatan dan penguatan program Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (BANGGA KENCANA) tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan kendala yang kemudian cukup tergambar pada kondisi pencapaian program BANGGA KENCANA di Kabupaten Boven Digoel selama lima tahun terakhir (Renstra 2021-2025) dimana target / sasaran yang telah di tetapkan belum berhasil di capai secara maksimal . Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) harus lebih meningkatkan komitmen bersama, dan lebih membangun kerjasama lintas sektor dengan seluruh mitra kerja utama, untuk bekerja lebih keras dalam upaya pencapaian target / sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rentra DPPKB 2021-2025

Akhirnya segala upaya dalam implementasi program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga (BANGGA KENCANA) yang telah direncanakan di dalam dokumen Renstra ini diharapkan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Permasalahan yang ada

didalam implementasi program BANGGA KENCANA kedepan merupakan tantangan bersama yang harus di hadapi melalui berbagai strategi yang telah di siapkan .

Dengan tersusunnya Rencana strategi (Renstra) ini, diharapkan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program BANGGA KENCANA untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan dapat menciptakan keluarga berkualitas menuju Boven Digoel Sejahtera, mandiri dan berdaya saing .

7.2 Saran

1. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, kegiatan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2021-2025). Semoga Upaya Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Boven Digoel dalam kurun waktu lima tahun dapat lebih terarah dan terukur.
2. Kepada Pemerintah Daerah diharapkan RENSTRA ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Kegiatan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
3. Penyusunan RENSTRA ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan moril kepada pihak swasta guna membantu Pembangunan BANGGA KENCANA (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) di kabupaten Boven Digoel.
4. Dan kepada masyarakat diharapkan pula bahwa penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari bukti kongkrit bahwa Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Melalui Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana beserta jajarannya benar-benar dan

sungguh-sungguh akan bekerja demi meningkatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi masyarakat Kabupaten Boven Digoel.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel dalam meningkatkan Keluarga berkualitas di tengah Masyarakat Kabupaten BovenDigoe